



Profesi Kependidikan



**I Komang Sukendra, S.Pd., M.Si., M.Pd.
Putu Dessy Fridayanthi, S.T., M.I.Kom.**





Profesi Kependidikan

**I Komang Sukendra, S.Pd., M.Si., M.Pd. & Putu Dessy
Fridayanthi, S.T., M.I.Kom.**

Copyright © 2020 by I Komang Sukendra, S.Pd., M.Si., M.Pd. &
Putu Dessy Fridayanthi, S.T., M.I.Kom.

Diterbitkan oleh:

KLIK MEDIA

Jl. Bromo 302 RT 01 RW 03 Kebonagung
Sukodono-Lumajang-Jawa Timur
Telp. 085259488719-081336335612

Desain cover : Sindy

Editor : Teddy Fiktorius

Layouter : Ainunrh

Terbit : Januari 2021

ISBN : 978-623-6951-50-7

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan
bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Kata Pengantar

Pendiri G2M2

(fiktoriusteddy@gmail.com - 0852 4592 1881)



SALAM HEBAT!

Salam yang paling tepat untuk menyambut hadirnya buku **“PROFESI KEPENDIDIKAN”**.

Andai saja rimba adalah pena dan samudra adalah tinta, pun tak akan cukup bagi kita untuk menuliskan betapa bersyukurya kita masih dilimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat berkarya dalam hidup ini. Buku ini merupakan karya nyata dari upaya penulis untuk mengukir namanya dalam peradaban ini. Ini lah insan yang senantiasa mengingat pesan almarhum Pramoedya Ananta Toer, penulis Indonesia.

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi narasumber sekaligus pengisi lembar kata pengantar pada



buku ini yang merupakan produk akhir dari sesi pendampingan penulisan naskah buku Gerakan Guru Membaca dan Menulis (G2M2) pada Workshop Nasional Daring dengan tema “Guru Profesional Berani Publikasi Ilmiah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Akademik (LPA) Universitas Mahadewa Indonesia pada tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020.

Teruntuk para pembaca yang budiman, selamat berliterasi ria. Semoga ‘Baca! Baca! Dan baca!’ menjadi slogan aktivitas intelektual Anda semua.

Teruntuk penulis, teruslah berkarya. Jadilah garda terdepan untuk menjaga obor literasi tetap menyala agar keberlangsungan peradaban kita tetap terjamin. Ingatlah senantiasa moto komunitas G2M2, **“Siang dan malam akan berlalu; namun tidak dengan tulisanku”**.

Pontianak, Desember 2020

Teddy Fiktorius, M.Pd.



Lebih lanjut tentang buku-buku dan jurnal ilmiah kependidikan karya Gerakan Guru Membaca dan Menulis (G2M2) dan Gerakan Murid Membaca dan Menulis (GM3), silakan hubungi 0852 4592 1881 atau fiktoriusteddy@gmail.com

Suasana Workshop Nasional Daring dengan tema “Guru Profesional Berani Publikasi Ilmiah” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Akademik (LPA) Universitas Mahadewa Indonesia pada tanggal 11 Juli 2020

Workshop Nasional Daring
“Guru Profesional Berani Publikasi Ilmiah”
Sabtu, 11 Juli 2020 s.d. Selasa, 14 Juli 2020 Pukul 13.00-16.00 WJTA

diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Akademik <LPA> Universitas Mahadewa Indonesia

NARASUMBER

<p>I Putu Sunthawa, S.P., M.Pd. Tim Penulis Jingga Kredit Press, Bali</p>	<p>Dr. I Wayan Surota, S.Pd., M.Pd. Widyaiswara LPPM Bali</p>	<p>Dr. I Made Surtia, S.P., M.Hum. Rektor Universitas Mahadewa Indonesia</p>	<p>Dr. I Wayan Widana, S.Pd., M.Pd. Penyempit Rutakata IJED</p>	<p>Dr. Ericka Burmannen, M.Pd. Revisi FKIP Kemuningtali</p>	<p>Teddy Fiktorius, M.Pd. Penyempit Rutakata IJED</p>
--	--	---	--	--	--

MODERATOR

<p>I Wayan Samandya, S.Pd., M.Pd. Editor IJED</p>
--

HOST

<p>Yulia Kesumawati, S.Sos., M.Pd. Peraih Satyaencana Pendidikan Presiden RI 2019</p>
--

Registrasi:
<http://gg.gg/regworkshop-ijed2>
(Silik meeting link yang dikirim melalui email pribadi)

Narohutuhang:
I Wayan Widana (08124670705)
Yudha (082135701609)

Fasilitas:
1. E-Sertifikat 32 Jam
2. Materi
3. Pendampingan hingga menghasilkan produk:
- Buku ber-ISBN
- Artikel Ilmiah IJED siap terbit

KONTRIBUSI 50K
BNI NO. 0390690351
A.N. BPK I WAYAN WIDANA



Zoom Meeting
Recording...
Total non-video participants: 45

Participants (95)

- Mariye Sekewadi
- MARLEN TULHALAURUWIS, pd
- Maryadi-OK-Sumiat

Zoom Group Chat

biasa...

From Johans J... to Everyone:
Terima kasih atas webinar nya yg sangat bermanfaat..

To: Maryadi-OK-Sumiat (Privately)
Type message here...

Zoom Meeting
Recording...
Host: Hesti, me

Participants (196)

- Teddy Fiktoris
- I Wayan Sumandya (Co-host)
- I Wayan widana (Co-host)
- SOPHAN ZARBAKI (Co-host)

Zoom Group Chat

From Ericka Darmawan to Everyone:
Siapkan namo setelah webinar dan diskuisi selesai, yang mau mencoba mengintalks, bisa mulai mendownload di <https://www.mendeley.com/download-desktop/#windows>

From Ahmad Fathullah_Kata Seang... to Everyone:
go to mendeley nya ga ketemu

From DARI SUSANTI HTB to Eve...
New message

To: Everyone
Type message here...

PENULISAN NASKAH BUKU BER-ISBN

PENERBITAN **APA SAJA?**



Sekapur Sirih

Rektor Universitas Mahadewa Indonesia

“Menulis adalah sebuah kebutuhan agar otak kita tidak dipenuhi oleh feses pemikiran. Maka, menulislah. Entah itu di buku tulis, daun lontar, prasasti, atau bahkan media sosial, menulislah terus tanpa peduli karyamu akan dihargai oleh siapa dan senilai berapa.”

Fiersa Besari-Penulis dan Pemusik dari Indonesia



UNESCO mempublikasi data statistik yang cukup mengejutkan pada tahun 2012. UNESCO menyebutkan bahwa indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Ini berarti bahwa dari setiap 1.000 penduduk Indonesia, hanya 1 orang saja yang memiliki minat baca! Kemudian, sebuah survei

yang dilaksanakan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2003 hingga 2004 menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara terkait minat baca. Negara tercinta ini hanya unggul dari Botswana yang berada pada posisi buntut, yakni peringkat 61.

Meskipun pengertian literasi sudah berkembang pesat, aktivitas membaca dan menulis tetap tergolong pada literasi dasar yang perlu dikuasai oleh setiap individu untuk



bertahan hidup. Membaca dipandang sebagai sebuah usaha untuk menggali ilmu. Ilmu tersebut seyogyanya perlu diikat dengan usaha literasi lainnya, yakni menulis. Penguatan budaya literasi adalah kunci untuk memajukan bangsa ini.

Suatu kebanggaan bagi saya untuk mengisi lembar sekapur sirih pada buku yang berjudul **“PROFESI KEPENDIDIKAN”** karya **I Komang Sukendra, S.Pd., M.Si., M.Pd.**, Sekretaris LPPM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan **Putu Dessy Fridayanthi, S.T., M.I.Kom.**, Kepala Bagian Humas Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Buku informatif ini merefleksikan inspirasi dan motivasi bagi pendidik dalam memahami dan menjalankan profesi kependidikannya.

Kepada pendiri G2M2, Bapak Teddy Fiktorius, penghargaan setinggi-tingginya atas upaya dalam memotivasi dan menginspirasi para pendidik, baik guru maupun dosen, untuk menunaikan gerakan literasi secara nyata.

Kepada penulis, teruslah mengukir aksara. Jadilah ujung tombak dalam mengawal obor literasi tetap menyala sebagai bukti nyata kedigdayaan peradaban kita.

Kepada pembaca, selamat membaca, merenung, dan pada akhirnya menuangkan gagasan-gagasan baru dalam budaya literasi menulis secara nyata.

Bali, Desember 2020

Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum.



Prakata

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku bertajuk “Profesi Kependidikan” hadir ditengah-tengah kita semua. Buku ini membahas: Hakikat profesi guru, Bimbingan dan Konseling, Profesi kependidikan tentang Bimbingan dan Konseling, Administasi sekolah, Supervisi pendidikan, dan Manajemen berbasis sekolah. Profesi kependidikan sebagai profesi yang sedang tumbuh (*emerging profession*) yang tingkat kematangannya belum sampai pada apa yang telah dicapai oleh profesi-profesi tua (*old profession*) seperti: kedokteran, hukum, notaris, farmakologi, dan arsitektur. Profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian/dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam perkembangannya menuju kesempurnaan manusiawi.

Buku ini tidak mungkin bisa hadir dihadapan kita semua tanpa bantuan dan dukungan dari keluarga, sahabat, mahasiswa, serta rekan kerja. Oleh karenanya penulis mengucapkan beribu terimakasih.

Penulis menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan mutlak dalam kehidupan ini. Demikian juga dengan buku ini yang pastinya masih terdapat banyak ruang yang membutuhkan penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca demi penyempurnaan buku ini.

Denpasar, Desember 2020
Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar – iii

Sekapur Sirih – vii

Prakata – ix

Daftar Isi – x

Bab 1 Hakikat Profesi Guru – 1

- A. Pengertian Profesi Guru – 1
- B. Jabatan Guru Dapat Dikatakan Sebagai Profesi – 8
- C. Tugas dan Fungsi Guru Serta Indikator Guru yang Profesional – 13
- D. Organisasi Guru dan Kode Etik Guru Indonesia–17

Bab 2 Bimbingan dan Konseling – 21

- A. Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah – 21
- B. Orientasi Bimbingan dan Konseling – 23
- C. Ruang Lingkup Pelayanan Bimbingan dan Konseling – 26
- D. Kode Etik Bimbingan Konseling – 28
- E. Peranan Guru dalam Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah – 30

Bab 3 Profesi Kependidikan tentang Bimbingan dan Konseling – 35

- A. Pengertian Bimbingan Dan Konseling – 35



- B. Peranan Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan di Sekolah – 39
- C. Prinsip Bimbingan dan Konseling – 42
- D. Asas Bimbingan dan Konseling – 47
- E. Landasan Bimbingan dan Konseling – 50
- F. Bidang Bimbingan Pribadi, Sosial, Belajar dan Karier – 55

Bab 4 Administrasi Sekolah – 59

- A. Pengertian Administrasi Sekolah – 59
- B. Fungsi Administrasi Secara Khusus – 69
- C. Kegiatan-Kegiatan Administrasi Guru di Sekolah—72
- D. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) – 77
- E. Silabus – 79

Bab 5 Supervisi Pendidikan – 87

- A. Perlunya Pembinaan Guru – 87
- B. Pengertian dan Fungsi Pokok Supervisi – 91
- C. Tanggung Jawab Pembinaan Profesionalisme Guru – 94
- D. Pendekatan Supervisi Pendidikan – 97

Bab 6 Manajemen Berbasis Sekolah – 105

- A. Latar Belakang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) — 105
- B. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah – 110
- C. Prinsip Dasar Manajemen Berbasis Sekolah – 113



D. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah dalam Perspektif Teoritik – 115

E. Kondisi yang Mendukung Implementasi di Sekolah – 131

Daftar Pustaka – 134

Profil Penulis – 137



Bab I

Hakikat Profesi Guru

A. Pengertian Profesi Guru

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/ menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan, yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme. Senada dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan



pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut, Sagala (dalam Deden, 2011), menegaskan bahwa, guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan memahami benar apa yang harus dilakukan, baik ketika di dalam maupun di luar kelas.

Menurut Dedi Supriadi (1999), profesi kependidikan atau keguruan dapat disebut sebagai profesi yang sedang tumbuh (*emerging profession*) yang tingkat kematangannya belum sampai pada apa yang telah dicapai oleh profesi-profesi tua (*old profession*) seperti: kedokteran, hukum, notaris, farmakologi, dan arsitektur. Selama ini, di Indonesia seorang sarjana pendidikan atau sarjana lainnya yang bertugas diinstitusi pendidikan dapat mengajar mata pelajaran apa saja, sesuai kebutuhan/ kekosongan/ kekurangan guru mata pelajaran di sekolah itu, cukup dengan “surat tugas” dari kepala sekolah. Adapun kelemahan-kelemahan lainnya yang terdapat dalam profesi keguruan di Indonesia, antara lain berupa: (1) Masih rendahnya kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan; (2) Sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang belum terpadu; (3) Organisasi profesi yang rapuh; serta (4) Sistem imbalan dan penghargaan yang kurang memadai.

Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semiprofesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode



etik dan ada aturan tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No. 26/1989).

a. Pengertian Profesi Keguruan

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah merealisasikan pengertian profesi keguruan untuk pendidikan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian/dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam perkembangannya menuju kesempurnaan manusiawi.
- b. Para anggota profesi keguruan terikat oleh pola sikap dan perilaku guru yang dirumuskan dalam kode etik guru Indonesia.
- c. Para anggota profesi keguruan dituntut untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan persiapan jabatan yang relatif panjang.
- d. Para anggota profesi keguruan terpanggil untuk senantiasa menyegarkan serta menambah pengetahuannya
- e. Untuk dapat melaksanakan profesi keguruan dengan baik, para anggota harus memiliki kecakapan / keterampilan teknis.
- f. Para anggota profesi keguruan perlu memiliki sikap bahwa jaminan tentang hak-hak profesional harus seimbang dan merupakan imbalan dari profesi profesionalnya.



b. Istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi

Diskusi tentang profesi melibatkan beberapa istilah yang berkaitan, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Sanusi, dkk (1991:19) menjelaskan kelima konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*experties*) dari para anggotanya. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi, yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu (pendidikan/pelatihan prajabatan) maupun setelah menjalani suatu profesi (*in service training*).
- b. Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyanggah suatu profesi. kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya.
- c. Profesionalisme menunjuk pada komitmen/paham para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya.
- d. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya.
- e. Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi



Surya dkk, (2000:4.5 – 4.90) memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut diatas sebagai berikut.

- a. Profesional mempunyai dua makna. *Pertama*, mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. *Kedua*, mengacu kepada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Sebutan dan penampilan profesional ini telah mendapat pengakuan baik formal maupun informal. Pengakuan formal diberikan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah atau organisasi profesi. Sedang pengakuan secara informal diberikan oleh masyarakat dan para pengguna jasa suatu profesi. Misalnya sebutan “guru profesional” adalah guru yang telah mendapat pengakuan secara formal sesuai ketentuan berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatannya maupun dengan latar belakang pendidikan formalnya. Dengan demikian guru SD yang telah lulus Diploma 2 dapat dikatakan sebagai guru profesional karena telah memiliki pengakuan formal, berupa ijazah Diploma II dan Akta II. Sebutan guru profesional juga dapat mengacu kepada pengakuan penampilan seorang guru dalam unjuk kerjanya yaitu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru.
- b. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Pada dasarnya profesionalisme itu merupakan motivasi intrinsik pada diri guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional.



- c. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sebutan profesionalitas menggambarkan suatu derajat keprofesionalitas seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
- d. Profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai kriteria sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan profesionalisasi, para guru secara bertahap akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut ditemukan sebagai berikut:

- a. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.
- b. Profesional adalah: (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.
- c. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional. (Depdiknas, 2005: 897)



Ada beberapa syarat-syarat menjadi guru sebagai berikut:

a. Takwa Kepada Tuhan

Takwa kepada Allah Swt merupakan syarat menjadi guru yang utama. Kita tahu bahwa takwa merupakan perintah dari Allah untuk menjalankan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Dalam artian sebagai seorang guru haruslah mendidik anak yang sesuai dengan perintah agama agar dapat menjadi seorang guru yang baik dan profesional.

b. Memiliki Akhlak atau Berkelakuan Baik

Dalam syarat menjadi guru yang baik haruslah memiliki akhlakul karimah, dengan akhlak serta berkelakuan yang baik maka itu akan mampu memberikan teladan yang baik pula bagi anak didiknya sehingga akan mencapai keberhasilan dalam mendidik anak didikannya yang akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik serta mulia.

c. Berilmu

Berilmu juga merupakan syarat menjadi guru yang juga sangat penting, karena semakin tinggi pendidikan seorang guru maka semakin tinggi dan baik pula mutu pendidikannya dan segala sesuatu yang dilakukan dan dicapai didasari dengan ilmu yang ditandai dengan: Memiliki Kualifikasi Akademik dimana seorang guru memiliki tingkat pendidikan yang memenuhi persyaratan yang mana dibuktikan dengan ijazah yakni ijazah sarjana (S.1) atau diploma empat (D.4). Memiliki Kompetensi yakni dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan



dan perilaku yang memang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Memiliki Sertifikat Pendidik (sertifikasi) yang membuktikan bahwa guru tersebut sebagai tenaga pengajar yang profesional. Sertifikat ini bertujuan untuk suatu penghargaan terhadap guru dimana guru tersebut telah memenuhi standar profesi guru dengan proses sertifikasi. Memiliki Kemampuan Mendidik agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai peraturan yang termasuk dalam undang-undang.

d. Sehat Jasmani Dan Rohani

Syarat menjadi guru juga harus memiliki kesehatan yang baik pula yang dapat memungkinkan bagi seorang guru untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai tenaga pengajar dengan baik dan sesuai tujuan.

B. Jabatan Guru Dapat Dikatakan Sebagai Profesi

Jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran) dari pekerjaan ini seseorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya. Hal ini berlaku sama pada pekerjaan lain. Namun dalam perjalanan selanjutnya, mengapa profesi guru menjadi berbeda dari pekerjaan lain. Menurut artikel "*The Limit of Teaching Profession*," profesi guru termasuk ke dalam profesi khusus selain dokter, penasihat hukum, pastur. Kekhususannya adalah bahwa hakekatnya terjadi dalam suatu bentuk pelayanan manusia atau masyarakat.



Orang yang menjalankan profesi ini hendaknya menyadari bahwa ia hidup dari padanya, itu haknya; ia dan keluarganya harus hidup akan tetapi hakikat profesinya menuntut agar bukan nafkah hidup itulah yang menjadi motivasi utamanya, melainkan kesediaannya untuk melayani sesama. Di lain pihak profesi guru juga disebut sebagai profesi yang luhur. Dalam hal ini, perlu disadari bahwa seorang guru dalam melaksanakan profesinya dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi. Guru dalam keadaan darurat dianggap wajib juga membantu tanpa imbalan yang cocok. Atau dengan kata lain hakikat profesi luhur adalah pengabdian kemanusiaan.

Profesionalisme adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan (Wignjosoebroto, 1999). Dengan demikian seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk mem bedakannya dengan kerja biasa (*occupation*) yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan/ atau kekayaan materiil-duniawi. Lebih lanjut Wignjosoebroto [1999] menjabarkan profesionalisme dalam tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari setiap kegiatan pemberian jasa profesii adalah bahwa kerja



seorang profesional itu beritikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapakan imbalan upah materiil, bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat; bahwa kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi. Ketiga watak kerja tersebut mencoba menempatkan kaum profesional (kelompok sosial berkeahlian) untuk tetap mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjual belikan sekedar untuk memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan demi kesejahteraan umat manusia. Kalau didalam pengamalan profesi yang diberikan ternyata ada semacam imbalan (honorarium) yang diterimakan, maka hal itu semata hanya sekedar tanda kehormatan demi tegaknya kehormatan profesi, yang jelas akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterimakan bagi para pekerja upahan saja.

Syarat Yang Harus Dipenuhi Sebagai Seorang Guru adalah :

1. Berijazah

Seorang guru harus memiliki ijazah yang dapat memberi wewenang untuk menjalankan tugas sebagai guru di suatu sekolah tertentu. Pemerintah telah mengadakan berbagai sekolah dan kursus-kursus serta akademi-



akademi yang khusus untuk mendidik orang-orang yang akan ditugaskan menjadi guru di sekolah, sesuai dengan wewenang ijazahnya masing-masing. Jelaslah bahwa ada bermacam-macam sekolah yang ada yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara.

2. Sehat Jasmani dan Rohani

Tiap-tiap pekerjaan membutuhkan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan pekerjaan itu dengan baik dan berhasil. Sebagai calon gurupun syarat kesehatan itu merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. Seorang guru yang berpenyakit menular akan membahayakan kesehatan anak-anak dan membawa akibat yang tidak baik dalam tugasnya sebagai pengajar dan pendidik. Demikianlah, kesehatan merupakan syarat utama bagi guru, sebagai orang yang setiap hari bekerja dan bergaul dengan dan diantara anak-anak.

3. Taqwa Kepada Tuhan YME dan berkelakuan baik.

Dalam GBHN 1983-1988 antara lain dinyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1954 Pasal 3 dinyatakan: tujuan pendidikan ialah membentuk manusia susila. Ketakwaan terhadap Tuhan YME, kesusilaan, watak atau budi pekerti yang baik, tidak mungkin diberikan oleh orang-orang yang tidak berketuhanan YME atau taat beribadat menjalankan agamanya dan tidak berkelakuan baik. Pembentukan manusia susila yang takwa kepada Tuhan YME hanya mungkin diberikan oleh orang-orang yang memiliki dan hidup sesuai dengan



norma-norma agama dan masyarakat serta peraturan-peraturan yang berlaku.

4. Bertanggung Jawab

Guru harus berusaha mendidik anak-anak menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menginsafi tugasnya sebagai warga negara. Sebagai warga negara dari suatu negara yang demokratis, harus turut serta memikul tanggung jawab atas kemajuan dan kemakmuran negara dan bangsanya. Pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab itu sungguh suatu tugas yang tidak mudah dan hanya dapat dilakukan oleh prang yang berjiwa demokratis yang mempunyai tanggung jawab pula. Jelaslah bahwa seorang guru harus seorang yang bertanggung jawab, kepada tugasnya sebagai guru yaitu mengajar dan mendidik anak-anak yang telah dipercayakan kepadanya. Di samping itu, tidak boleh pula dilupakan tugas-tugas dan pekerjaan lain yang memerlukan tanggung jawabnya. Selain tugasnya sebagai guru di sekolah guru pun merupakan anggota masyarakat yang mempunyai tugas dan kewajiban lain

5. Berjiwa Nasional

Pendidikan nasional tidak dapat diberikan oleh orang-orang yang tidak nasional. Guru harus berjiwa nasional merupakan syarat yang penting untuk mendidik anak-anak, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah digariskan oleh MPR, seperti dinyatakan di dalam GBHN 1983-1988 dan UUD 1945.



C. Tugas dan Fungsi Guru Serta Indikator Guru yang Profesional

- a. Guru memiliki tugas, baik yang terikat dengan dinas maupun diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan ada tiga jenis tugas guru, yakni : (a). Tugas dalam bidang Profesi, (b). Tugas kemanusiaan, (c). Tugas dalam bidang Kemasyarakatan. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua, ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.
- b. Fungsi guru Adapun fungsi guru adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Sebagai Pengajar (Instruksional)

Yaitu fungsi untuk melaksanakan tugas mengajar (*to teach*), tugas ini secara kejuruan merupakan tugas tradisional. System instruksional



dibentuk oleh 2 konsep, yaitu system dan instruction, yang diartikan sebagai suatu perangkat dari bagian-bagian yang diikat atau dipersatukan oleh beberapa bentuk hubungan saling mempengaruhi. Istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu proses belajar mengajar. Disamping itu juga ada unsure lainnya yang menyempurnakan proses belajar mengajar ini, yaitu unsure komponen dan proses.

2. Fungsi Sebagai Pendidik (*Educational*)

Fungsi ini bagi guru sebenarnya merupakan fungsi yang pokok yaitu fungsi untuk mendidik, sebab guru bukan hanya menjalankan tugas mengajar tetapi juga mendidik. Bahkan fungsi mendidik ini harus lebih diutamakan dan harus merupakan fungsi sentral guru. Dengan fungsi educationalnya seorang guru tidak hanya berusaha agar siswanya menjadi pandai tetapi ia akan berusaha agar siswanya menjadi orang dewasa yang berkepribadian baik. “Dunia pendidikan tidak pernah lepas dari guru yang merupakan komponen utama penggerak roda sekolah sekaligus ujung tombak pengentas kebodohan. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar saja, tetapi juga mendidik agar siswa menjadi manusia dewasa yang mengamalkan nilai-nilai pancasila. Fungsi guru sebagai Education merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai roll model, memberikan contoh-contoh



dalam hal sikap dan perilaku dan membentuk kepribadian peserta didik

3. Fungsi Sebagai Pemimpin (Managerial)

Pengertian pemimpin disini adalah, pemimpin bagi diri sendiri, siswa maupun orang lain (masyarakat). Memimpin diri sendiri maksudnya adalah dapat mengarahkan, mengawasi, mengorganisasi, dan mengontrol kegiatan sendiri. Memimpin siswa adalah memimpin/membimbing anak dalam belajar. Memimpin orang lain/masyarakat artinya seorang guru ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, menjadi teladan dan menggabungkan pikiran dari masyarakat. Dengan demikian tugas guru sebagai pemimpin tidak hanya terbatas dalam kelas (internal kelas) tetapi juga eksternal (diluar kelas). Seorang Guru hendaknya secara terus menerus mengembangkan dirinya dengan meningkatkan penguasaan pengetahuan secara terus menerus sehingga pengetahuan yang dimilikinya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan jaman.

a. Menguasai media pembelajaran

Guru profesional harus mampu menguasai media pembelajaran, Pengembangan alat/media pembelajaran dapat berbasis kompetensi lokal maupun modern dan berbasis ICT. Saat ini Dinas Pendidikan Kota / Kabupaten telah mewajibkan guru tersertifikasi memiliki laptop guna meningkatkan kualitas pembelajaran.



b. Penguasaan teknologi

Penguasaan teknologi mutlak diperlukan oleh guru. Guru hendaknya menguasai materi dan sekaligus metode penelitiannya sesuai dengan kedalaman materi yang diajarkan. Jaringan dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Instansi yang terkait lainnya.

c. Memiliki kepribadian yang baik

Jika seorang pendidik mempunyai karakter seperti diatas, akan disenangi oleh peserta didik, dengan sendirinya akan disenangi ilmu yang diajarkannya juga. Banyak siswa yang membenci suatu ilmu atau materi pembelajaran karena watak gurunya yang keras, kasar dan cara mengajar guru yang sulit. Nah dan disisi lain pula siswa menyukai dan tertarik untuk mempelajari suatu ilmu atau mata pelajaran, karena cara perlakuan yang baik, kelembutan, keteladanannya yang indah dari gurunya.

d. Menjadi teladan yang baik

Guru hendaknya menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Untuk memperoleh jawaban tentang ciri-ciri ideal seorang guru yang dapat dijadikan teladan oleh peserta didik, peling tidak harus melakukan pendekatan terhadap peserta didiknya.



D. Organisasi Guru dan Kode Etik Guru Indonesia

Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembangunan khusus pembangunan manusia Indonesia melalui proses pendidikan dituntut untuk memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi sehingga dapat berperan aktif serta efektif dalam menghasilkan manusia Indonesia yang dapat membangun bangsa dan negara menjadi bangsa yang sejahtera dan berkarakter. Untuk itu maka guru harus memiliki integritas dan karakter yang baik sehingga dapat menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya. Karakter ini diwujudkan etika yang harusnya menjadi kepribadian sehari-hari oleh para guru. Bagi tenaga guru di Indonesia etika tersebut dirumuskan dalam bentuk kode etik yang menjadi pedoman bagi guru Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru.

Adapun kode etik jabatan guru adalah Guru sebagai manusia Pancasila hendaknya senantiasa menjunjung tinggi dan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Guru sebagai pendidik hendaknya bertekad untuk menciptakan anak-anak dan jabatannya, serta selalu menjadikan dirinya suri teladan bagi anak didiknya. Setiap guru berkewajiban selalu menyelaraskan pengetahuan dan meningkatkan kecakapan profesinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Setiap guru diharapkan selalu memperhitungkan masyarakat sekitarnya, sebab pada hakekatnya pendidikan itu merupakan tugas pembangunan dan tugas kemanusiaan. Setiap guru berkewajiban meningkatkan kesehatan dan keselarasan jasmaniahnya, sehingga berwujud penampilan pribadi yang sebaik-baiknya. Agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.



Di dalam hal berpakaian dan berhias, seorang guru hendaknya memerhatikan norma-norma, estetika dan sopan santun. Guru hendaknya bersikap terbuka dan demokratis dalam hubungan dengan atasan dan sanggup menempatkan dirinya sesuai dengan hierarki kepegawaian. Jalinan hubungan antara seorang guru dengan atasannya hendaknya selalu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. Setiap guru berkewajiban untuk selalu memelihara semangat korps dan meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama guru dan pegawai lainnya. Setiap guru hendaknya bersikap toleran dalam menyelenggarakan setiap persoalan yang timbul atas dasar musyawarah dan mufakat demi kepentingan bersama. Setiap guru dalam pergaulan dengan murid-muridnya tidak dibenarkan mengaitkan persoalan politik dan ideologi yang dianutnya, baik secara langsung dan tidak langsung. Setiap guru hendaknya mengadakan hubungan yang baik dengan instansi, organisasi atau perseorangan dalam menyukseskan kerjanya. Setiap guru berkewajiban untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah. Setiap guru berkewajiban memakai peraturan-peraturan dan menekankan adat istiadat setempat secara fleksibel.

Berdasarkan pembahasan yg telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Guru merupakan seorang pendidik profesional dengan tugas utama untuk mendidik, mengarahkan, dan melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran) dan dari pekerjaan ini



seseorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya seorang guru juga memiliki syarat yaitu: berijazah ,sehat jasmani dan rohani takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik, bertanggung jawab serta berjiwa nasional.





Bab 2

Bimbingan dan Konseling

A. Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah

1. Organisasi

Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak mesti sama. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Meskipun demikian, struktur organisasi pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat didalam sebuah satuan pendidikan yang ditujukan bagi optimalnya bimbingan dan konseling.
- b. Sederhana, maksudnya dalam pengambilan keputusan/kebijaksanaan jarak antara pengambil kebijakan dengan pelaksanaannya tidak terlampau panjang. Keputusan dapat dengan cepat diambil tetapi dengan pertimbangan yang cermat, dan pelaksanaan layanan/kegiatan bimbingan dan konseling terhindar dari urusan birokrasi yang tidak perlu.
- c. Luwes dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan tugas-tugas organisasi, yang semuanya itu bermuara pada kepentingan seluruh peserta didik.



- d. Menjamin berlangsungnya kerjasama, sehingga semua unsur dapat saling menunjang dan semua upaya serta sumber dapat dikoordinasikan demi kelancaran dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling untuk kepentingan peserta didik.
- e. Menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian dan upaya tindak lanjut, sehingga perencanaan pelaksanaan dan penilaian program bimbingan dan konseling yang berkualitas dapat terus dilakukan.

2. Personil

Personil pada umumnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Personil pada kantor Dinas Pendidikan, yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling disatuan pendidikan.

- a. Kepala Sekolah, sebagai penanggung jawab program pendidikan secara menyeluruh (termasuk di dalamnya program bimbingan dan konseling) di satuan pendidikan masing-masing.
- b. Guru Pembimbing atau Guru Kelas, sebagai petugas utama dan tenaga inti dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
- c. Guru-guru lain, (guru mata pelajaran, Guru Praktik) serta wali kelas, sebagai penanggung jawab dan tenaga ahli dalam mata pelajaran, program latihan atau kelas masing-masing.
- d. Orang tua, sebagai penanggung jawab utama peserta didik dalam arti yang seluas-luasnya.



- e. Ahli-ahli lain, dalam bidang non bimbingan dan non pelajaran/latihan (seperti dokter, psikolog, psikiater) sebagai subjek alih tangan kasus.
- f. Sesama peserta didik, sebagai kelompok subyek yang potensial untuk diselenggarakannya “bimbingan sebaya”

B. Orientasi Bimbingan dan Konseling

1. Orientasi Perseorangan

Orientasi perseorangan adalah suatu layanan bimbingan konseling yang menghendaki seorang konselor menitikberatkan pandangannya terhadap setiap individu yang ada. Konselor harus lebih mengutamakan individu dan kelompok atau kelas dimana merupakan faktor yang mampu berpengaruh dalam hal tertentu pada individu. Dengan begitu, maka kelompok atau kelas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan individu tersebut. Menurut pendapat Prayitno dan Erman (2004, hal. 234) ada sejumlah kaidah yang berkaitan dengan orientasi perorangan dalam bimbingan dan konseling dapat dicatat sebagai berikut :

- a. Semua kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling diarahkan bagi peningkatan perwujudan diri sendiri setiap individu yang menjadi sasaran layanan.
- b. Pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan berkenaan dengan individu untuk memahami kebutuhannya, motivasi dan kemampuan potensialnya kearah pengembangannya yang optimal, dan



pemanfaatannya yang sebesar- besarnya bagi diri dan lingkungannya.

- c. Setiap klien harus diterima sebagai individu dan harus ditangani secara individual (Rogers, dalam Mc Daniel,1956).
- d. Menjadi tanggung jawab konselor untuk memahami minat, kemampuan, dan perasaan klien serta untuk menyesuaikan program-program pelayanan dengan kebutuhan klien setepat mungkin. Dalam hal itu, penyelenggaraan program yang sistematis untuk mempelajari individu merupakan dasar yang tak terelakkan bagi berfungsinya program bimbingan (Mc Daniel, 1956).

2. Orientasi Perkembangan

Orientasi perkembangan merupakan bimbingan konseling yang menitik beratkan pada pentingnya perkembangan yang ada dalam individu. Dengan kata lain, peranan bimbingan dan konseling adalah memberikan kemudahan-kemudahan bagi gerak individu menjalani alur perkembangannya. Pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung dan dipusatkan untuk menunjang kemampuan intern individu bergerak menuju kematangan dalam perkembangannya. Perkembangan merupakan konsep inti dan terpadukan, serta menjadi tujuan dari segenap layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ditegaskan bahwa, praktek bimbingan dan konseling tidak lain adalah memberikan kemudahan yang berlangsung perkembangan yang berkelanjutan. Permasalahannya yang dihadapi oleh individu harus diartikan sebagai terhalangnya perkembangan, dan hal itu semua mendorong konselor dan



klien bekerjasama untuk menghilangkan penghalang itu serta memengaruhi lajunya perkembangan klien.

3. Orientasi Permasalahan

Bimbingan dan konseling pada dasarnya memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada. Jika dipandang demikian, maka bimbingan dan konseling tentu sangat berkaitan dengan masalah. Untuk itu orientasi permasalahan dalam bimbingan konseling adalah bimbingan konseling yang menitikberatkan pada masalah yang sedang terjadi pada individu. Jenis masalah yang diderita oleh individu amat bervariasi. Roos L. Mooney (dalam Prayitno, 1987) mengidentifikasi 330 masalah yang digolongkan kedalam sebelas kelompok masalah, yaitu kelompok masalah yang berkenaan dengan:

- a. Perkembangan jasmani dan kesehatan (PJK)
- b. Keuangan, keadaan lingkungan dan pekerjaan (KLP)
- c. Kegiatan sosial dan reaksi (KSR)
- d. Hubungan muda-mudi, pacaran dan perkawinan (HPP)
- e. Hubungan sosial kejiwaan (HSK)
- f. Keadaan pribadi kejiwaan (KPK)
- g. Moral dan agama (MDA)
- h. Keadaan rumah dan keluarga (KRK)
- i. Masa depan pendidikan dan pekerjaan (MPP)
- j. Penyesuaian terhadap tugas-tugas sekolah (PTS)
- k. Kurikulum sekolah dan prosedur pengajaran (KPP)



C. Ruang Lingkup Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Pelayanan bimbingan konseling merupakan peranan penting, bagi individu yang berada di lingkungan sekolah, keluarga ataupun masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana pendapat Abu Bakar M. Ludddin (2010:29) ruang lingkup bimbingan konseling terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat. Dalam lembaga sekolah terdapat berbagai macam bidang kegiatan dan bidang pelayanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang khusus. Bidang-bidang tersebut diantaranya: bidang kurikulum, bidang administrasi, dan bidang kesiswaan. Pelayanan bimbingan disekolah pun mempunyai lingkup yang cukup luas. Lingkup bimbingan konseling disekolah dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu dari segi fungsi, segi sasaran, segi layanan dan segi masalah.



2. Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Luar Sekolah

Pelayanan bimbingan konseling tidak hanya didapat oleh mereka yang berada dilingkungan sekolah atau pendidikan saja. Masyarakat diluar sekolah pun bisa mendapatkan pelayanan bimbingan konseling. Sebagaimana pendapat Abu Bakar M. Ludddin (2010:31) konseling diluar sekolah meliputi :

a. Bimbingan dan Konseling dalam Lingkungan Keluarga

Dalam pelayanan bimbingan konseling, di lingkup khususnya keluarga, tidak akan pernah lepas dari masalah, konflik dan situasi/kejadian yang tidak menyenangkan terkait dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Adapun cara menangani atau menyelesaikan masalah keluarga dengan cara konseling keluarga (family conseling). Tujuan utama adanya bimbingan dan konseling keluarga adalah untuk memperlancar komunikasi antara anggota keluarga yang mungkin karena sesuatu hal menjadi terhambat.

b. Bimbingan dan Konseling dalam Lingkungan yang Lebih Luas (Bimbingan dan Konseling di Masyarakat)

Permasalahan yang dialami oleh masyarakat tidak hanya terjadi dilingkungan sekolah ataupun keluarga saja, melainkan juga diluar keduanya. Masyarakat di lingkungan perusahaan, industri, bahkan di lembaga masyarakat tidak terhindar dari kemungkinan menghadapi masalah. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan. Adapun fungsi layanan bimbingan dan konseling di masyarakat sebagai berikut:



- (1) Fungsi pemahaman, membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya
- (2) Fungsi Pencegahan, upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, agar tidak dialami oleh konseling.

D. Kode Etik Bimbingan Konseling

Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor. Menurut Sunaryo Kartadinata (2011:15) kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Penegakan dan penerapan kode etik bertujuan untuk: (1) menjunjung tinggi martabat profesi; (2) melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik; (3) meningkatkan mutu profesi; (5) menjaga standar mutu dan status profesi, dan (6) penegakan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandanginya.

Kode Etik Bimbingan dan Konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh ABKIN (2006:69) memuat hal-hal berikut:

a. Kualifikasi

Bahwa konselor wajib memiliki a) nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang Bimbingan dan Konseling, b) memperoleh



pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai Konselor.

- b. Informasi, testing dan riset
 - (1) penyimpanan dan penggunaan informasi,
 - (2) testing, diberikan kepada Konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya,
 - (3) riset, menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan.
- c. Proses pada pelayanan
 - (1) hubungan dalam pemberian pada pelayanan,
 - (2) hubungan dengan klien.
- d. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain;
 - (1) pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat;
 - (2) alih tangan kasus apabila tidak dapat memberikan bantuan kepada klien tersebut.
- e. Hubungan Kelembagaan
 - Memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan
- f. Praktik Mandiri dan laporan kepada pihak lain
 - (1) konselor praktik mandiri, menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara private,
 - (2) laporan kepada pihak lain.
- g. Ketaatan kepada profesi
 - (1) pelaksanaan hak dan kewajiban, serta
 - (2) pelanggaran terhadap kode etik



E. Peranan Guru dalam Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Guru sangat berperan dalam pendidikan, dalam mengembangkan profesinya sebagai pondasi dasar maka guru mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Tugas professional, yaitu tugas yang berkenaan dengan profesinya.

Tugas ini mencakup tugas mendidik, mengajar, melatih, dan mengelola ketertiban sekolah sebagai penunjang ketahanan sekolah.

- b. Tugas manusiawi, yaitu tugas nya sebagai manusia. Dalam hal ini, guru bertugas mewujudkan dirinya melakukan auto pengertian untuk dapat menempatkan dirinya di dalam keseluruhan kemanusiaan, sesuai dengan martabat manusia.

- c. Tugas kemasyarakatan, yaitu tugas guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam pancasila, undang undang dasar 1945 dalam hal ini guru berfungsi sebagai perancang masa depan dan penggerak kemajuan.

Peranan guru adalah setiap pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri jabatan guru yang harus dilakukan guru dalam tugasnya. Peranan ini meliputi berbagai jenis pola tingkah laku, baik dalam kegiatannya di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Berikut dapat disimpulkan peranan guru, diantaranya :



1. Guru Sebagai Mediator Kebudayaan

Dalam peranan ini guru merupakan seorang perantara di dalam suatu proses pewarisan kebudayaan. Dalam peranannya sebagai mediator, kebudayaan maka seorang guru harus sanggup memberikan, mengajarkan, dan membimbing berbagai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada murid- muridnya.

2. Guru Sebagai Pembimbing

Dalam tugas pokoknya yaitu mendidik, guru harus membantu agar anak mencapai kedewasaan secara optimal, artinya kedewasaan yang sempurna sesuai dengan norma dan sesuai pula dengan kodrat yang dimilikinya.

3. Guru Sebagai Mediator Antara Sekolah Masyarakat

- a. Memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan pendidikan yang sedang berlangsung atau yang akan ditempuh.
- b. Menerima usul-usul atau pertanyaan dari pihak masyarakat tentang pendidikan.
- c. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan antara sekolah dan masyarakat, khususnya dengan orang tua murid.
- d. Bekerjasama dengan berbagai pihak di masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan.
- e. Menyelenggarakan hubungan yang sebaik-baiknya antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pendidikan.



f. Guru merupakan suara sekolah di masyarakat dan suara masyarakat di sekolah.

4. Guru Sebagai Penegak Disiplin

Dalam peranan ini guru harus menegakkan suatu disiplin baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru harus menjadi teladan bagi terlaksananya suatu disiplin. Juga guru harus membimbing murid agar menjadi warga sekolah dan masyarakat yang disiplin.

5. Guru Sebagai Administrator Kelas

Sebagai administrator tugas seorang guru harus dapat menyelenggarakan program pendidikan dengan sebaik baiknya. Guru harus mengambil bagian dalam perencanaan kegiatan pendidikan, mengatur dan menyusun berbagai aspek dalam pendidikan, mengarahkan kegiatan kegiatan dalam pendidikan, dan mengawasi serta menilai kegiatan kegiatan pendidikan.

6. Guru Sebagai Anggota Suatu Profesi

Pekerjaan guru sebagai suatu profesi berarti bahwa guru merupakan seorang yang ahli. Sebagai anggota suatu profesi maka guru harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tertentu yaitu keterampilan keguruan. Kemampuan untuk membimbing murid, merupakan salah satu aspek keterampilan profesi guru. Disamping itu seorang guru harus menunjukkan, mempertahankan serta mengembangkan keahliannya itu.



Sedangkan Sardiman (2001: 142) menyatakan bahwa ada sembilan peranan guru dalam kegiatan bimbingan konseling, yaitu:

- 1) Informator, Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
- 2) Organisator, Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran dan lain-lain.
- 3) Motivator, Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas) sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar.
- 4) Director, Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
- 5) Inisiator, Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar.
- 6) Tranmitter, Guru sebagai penyebar kebijakan dalam pendidikan dan pengetahuan.
- 7) Fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar.
- 8) Mediator, Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa.
- 9) Evaluator, Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa Bimbingan dan Konseling adalah proses interaksi antara Konselor dengan Konseli baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang menjadi konselor di sekolah ialah guru yang memiliki pengalaman maupun wawasan dibidang bimbingan dan



konseling. Struktur pelayanan bimbingan dan konseling ini tidak mesti sama disetiap sekolah, namun dapat dibedakan melalui situasi dan kondisi sekolah tersebut. Walaupun struktur pelayanan tersebut berbeda, ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti menyeluruh, sederhana, luwes dan terbuka, menjamin berlangsungnya kerjasama, dan menjamin terlaksananya pengawasan. Orientasi bimbingan dan konseling ada tiga, yaitu orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. Adapun kode etik dalam menjalankan bimbingan dan konseling ada tujuh bagian, antara lain 1). Kualifikasi; 2). Informasi, testing dan riset; 3). Proses pada pelayanan; 4). Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain; 5). Hubungan kelembagaan; 6). Praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain; dan 7). Ketaatan kepada profesi. Peranan guru disekolah itu sangat penting, tanpa adanya guru maka sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Terdapat empat macam peranan guru di sekolah ialah guru sebagai mediator kebudayaan, guru sebagai pembimbing, guru sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat, dan terakhir guru sebagai penegak disiplin. Peranan-peranan guru tersebut tidaklah mudah untuk dijalankan, itu adalah alasan mengapa ada pendidikan keguruan di beberapa instansi pendidikan.





Bab 3

Profesi Kependidikan tentang Bimbingan dan Konseling

A. Pengertian Bimbingan Dan Konseling

Secara etimologis bimbingan dan konseling terdiri dari atas dua kata “ Bimbingan” (*guidance*) dan “ konseling “ (diadopsi dari kata *counseling*) Kata *guidance* yang berasal dari “*guide*” mempunyai beberapa arti Menunjukkan jalan, Memimpin, Mengatur, Mengarahkan, Memberi nasehat. Istilah “*guidance*” bantuan atau tuntunan, pertolongan. Bantuan atau tuntunan atau pertolongan yang bermakna bimbingan konteksnya sangat psikologis.

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seorang yang ahli, namun tidak sesederhana itu untuk memahami pengertian dari bimbingan. Pengertian tentang bimbingan formal telah diusahakan orang setidaknya sejak awal abad ke-20, yang diprakarsai oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak itu muncul rumusan tentang bimbingan sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan, sebagai suatu pekerjaan yang khas yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya. Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. (Frank Parson ,1951). “Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu



jabatan dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya” Frank Parson merumuskan pengertian bimbingan dalam beberapa aspek yakni bimbingan diberikan kepada individu untuk memasuki suatu jabatan dan mencapai kemajuan dalam jabatan. Pengertian ini masih sangat spesifik yang berorientasi karir.

- b. (Chiskolm,1959).“Bimbingan membantu individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri” Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh Chiskolm bahwa bimbingan membantu individu memahami dirinya sendiri, pengertian menitik beratkan pada pemahaman terhadap potensi diri yang dimiliki.
- c. (Bernard & Fullmer ,1969).“Bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu” Pengertian yang dikemukakan oleh Bernard & Fullmer bahwa bimbingan dilakukan untuk meningkatkan pewujudan diri individu. Dapat dipahami bahwa bimbingan membantu individu untuk mengaktualisasikan diri dengan lingkungannya.
- d. (Mathewson,1969).“Bimbingan sebagai pendidikan dan pengembangan yang menekankan proses belajar yang sistematis” Mathewson mengemukakan bimbingan sebagai pendidikan dan pengembangan yang menekankan pada proses belajar.
- e. (Tohirin) Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada anak atau kelompok anak dari segala umur tanpa memandang jenis kelamin yang mengalami problem (kesulitan hidup), supaya anak/kelompok anak itu, dapat menentukan problemnya sendiri, dapat memecahkan



sendiri sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup yang baik lahir maupun batin.

- f. (hertzer dan Stone) bimbingan adalah proses membantu orang perorangan untuk memahami dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya.
- g. (Moh. Surya) Bimbingan yaitu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya .

Dari beberapa pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat diambil kesimpulan tentang pengertian bimbingan yang lebih luas, bahwa bimbingan adalah Suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkunganya serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.

Konseling adalah suatu proses dimana konselor membantu konseli membuat interprestasi-interprestasi tetang fakta-fakta yang berhubungan dengn pilihan, rencana, atau penyesuaian-penyeseuaian yang perlu dibuat.

- a) (*Division of Conseling Psychologi*). Konseling merupakan suatu proses untuk memebantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangn dirinya,dan untuk mencapai perkembangan yang optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya ,proses tersebut dapat terjadi setiap waktu.



- b) (Mc. Daniel,1956). Konseling adalah suatu pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinyasendiri dan lingkungan.
- c) (Berdnard & Fullmer ,1969) Konseling meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk mengungkapkan kebutuhan kebutuhan, motivasi, dan potensi-potensi yang yang unik dari individu dan membantu individu yang bersangkutan untuk mengapresiasi ketige hal tersebut.
- d) Wagito, (dalam Aqib 2012:29) mengemukakan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

“Proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara Konseling oleh seorang ahli (disebut Konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dialami oleh klien

Dari semua pendapat di atas dapat dirumuskan dengan singkat bahwa Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling (*face to face*) oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu



atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Permendikbud RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

B. Peranan Bimbingan dan Konseling Dalam Pendidikan di Sekolah

Tujuan pendidikan pada akhirnya adalah pembentukan manusia yang utuh dan mandiri, maka proses pendidikan harus dapat membantu siswa mencapai kematangan emosional dan sosial, sebagai individu dan anggota masyarakat selain mengembangkan kemampuan inteletiknya. Bimbingan dan konseling semakin hari semakin dirasakan perlu keberadaannya di setiap sekolah. Hal ini didukung oleh berbagai macam faktor, seperti dikemukakan oleh Koestoeer Partowisastro (1982), sebagai berikut :

1. Sekolah merupakan lingkungan hidup kedua setelah rumah, dimana anak dalam waktu sekian jam (kurang lebih 6 jam) hidupnya berada di sekolah
2. Para siswa yang usianya relative lebih muda sangat membutuhkan bimbingan baik dalam memahami



dirinya, mengarahkan dirinya, maupun dalam mengatasi berbagai macam kesulitan.

Konselor dan guru merupakan suatu tim yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan, keduanya sebenarnya tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan karena keduanya berupaya untuk membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal.

Peranan BK dalam proses pembelajaran di sekolah, Guru bimbingan konseling berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutin, incidental, dan keteladanan, seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (4) bahwa pendidikan diselenggarakan dengan member keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, dan pasal 12 ayat (1b) yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan di dalam pembelajaran sekolah/tatap muka dan di luar jam pembelajaran sekolah berupa layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan mediasi (layanan yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka), serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan diluar sekolah.

Kita sering menemukan siswa menunjukkan sikap berbeda satu dengan yang lainnya, padahal kita dapat mengenali secara pasti mana siswa yang sedang bermasalah dan mana siswa yang tidak sedang bermasalah dalam



pembelajaran. Indicator siswa mengalami kesulitan dalam belajar dapat diketahui dari berbagai jenis gejalanya seperti yang dikemukakan Ahmadi (1977) sebagai berikut :

- a. Hasil belajar rendah, di bawah rata-rata kelas
- b. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan,
- c. Menunjukkan sikap yang kurang wajar, suka menantang dan dusta

Apabila peserta didik berada dalam indicator diatas, maka bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan dalam :

- a. Bimbingan belajar
- b. Bimbingan sosial, dan
- c. Bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi.

Dalam hal apa dan bagaimanakah bimbingan konseling bisa berperan dalam peningkatan mutu pendidikan ? jawabannya harus dimulai dari tiga hal yang bisa menjadi indikator dari kesuksesan pendidikan itu sendiri, yakni administrasi sekolah, pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan, dan tentu saja hasil yang diperoleh oleh siswa.

Pertama dimana yang dimaksud dengan administrasi sekolah bukanlah aspek tata usaha, melainkan lebih pada aspek manajerial dan kepemimpinan sekolah. Secara khusus bimbingan konseling dan administrasi sekolah mempunyai hubungan yang bersifat mutualistik.

Kedua, aspek pengajaran dan pembelajaran disekolah identik dengan kurikulum yang ada, diman kemudian



tujuannya adalah menyediakan pengalaman belajar bagi siswa untuk meresapi pengalaman belajar tersebut. Artinya dengan masukan dari bimbingan konseling, kurikulum bisa lebih personal bagi siswa..

Ketiga, bimbingan konseling punya peran besar dalam meningkatkan kualitas siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari bimbingan dan konseling disekolah yakni untuk membantu siswa untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, berbagai latar belakang yang ada serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.

C. Prinsip Bimbingan dan Konseling

1. Prinsip-Prinsip Umum
 - a. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya .
 - b. Bimbingan diarahkan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan -kesulitan yang dihadapinya.
 - c. Pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu (siswa) yang dibimbing. Antara individu yang satu dengan yang lainnya berbeda. Demikian juga dengan kebutuhannya, oleh sebab itu, pembimbing harus memahami perbedaan kebutuhan tersebut agar bisa memberikan bantuan (bimbingan) sesuai kebutuhan individu.



- d. Bimbingan berkenaan dengan sikap dan tingkah laku individu. Bimbingan dan konseling diberikan kepada individu dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku individu kearah yang lebih baik.
 - e. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing.
 - f. Upaya pemberian bantuan (pelayanan bimbingan dan konseling) harus dilakukan secara fleksibel (tidak kaku). Artinya harus bisa menyesuaikan dengan kondisi.
2. Prinsip-perinsip khusus yang berhubungan dengan individu (siswa)
 - a. Pelayanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada semua siswa. Artinya semua siswa baik yang memiliki masalah sederhana hingga yang kompleks perlu dibantu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
 - b. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa.
 - c. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa.
 - d. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu (siswa) yang bersangkutan beragam dan luas.
3. Prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing
 - a. Pembimbing atau konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing.



- b. Pembimbing atau konselor disekolah atau madrasah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya.
 - c. Sebagai tuntunan profesi, pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan diri dan keahliannya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penataran, work shop, dan sebagainya.
 - d. Pembimbing atau konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia tentang individu atau siswa yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan untuk membantu individu yang bersangkutan kearah penyesuaian diri yang lebih baik.
4. Prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi (manajemen) pelayanan bimbingan dan konseling
- a. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.
 - b. Pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ada di kartu pribadi (cumulative record) bagi setiap siswa.
 - c. Program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah.
 - d. Harus ada pembagian waktu antar pembimbing, sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling.



- e. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait.

Dapat kita lihat dari rumusan masing-masing mempunyai poin-poin tertentu, yaitu:

1. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan
 - a. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama dan status sosial ekonom.
 - b. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis.
 - c. Bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap berbagai aspek perkembangan individu.
 - d. Bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan.
2. Prinsip yang berkenaan dengan pemmasalahan individu
 - a. Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental/fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu.
 - b. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan factor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling.
3. Prinsip yang berkenaan dengan program layanan



- a. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu; oleh karena itu program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik.
 - b. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga.
 - c. Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi.
4. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan
- a. Bimbingan dan konseling harus mengarahkan individu mampu menyelesaikan permasalahan pribadi.
 - b. Dalam proses bimbingan dan konseling keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu harusnya atas kemauan individu sendiri, bukan karena desakan atau kemauan orang lain.
 - c. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dan bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
 - d. Kerja sama antara pembimbing dengan guru lain dan orang tua menentukan hasil pelayanan pembimbingan.
 - e. Pengembangan program layanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses



pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri.

D. Asas Bimbingan dan Konseling

Ada 12 asas dalam bimbingan konseling yaitu:

1. Asas Kerahasiaan

Merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan. Di mana data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain harus dirahasiakan oleh konselor. Dalam hal ini, konselor wajib secara penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaan benar- benar terjamin.

2. Asas kesukarelaan

Merupakan asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti, menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Dalam hal ini konselor wajib membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut.

3. Asas keterbukaan

Merupakan asas yang menghendaki konseli yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya.



4. Asas kekinian

Merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang. Layanan yang berhubungan dengan masa depan atau kondisi di masa lampau pun dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dilakukan sekarang.

5. Asas kemandirian

Merupakan asas yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling yaitu konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu untuk mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik.

6. Asas kegiatan

Merupakan asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran ikut berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan bimbingan konseling. Dalam hal ini konselor perlu mendorong konseli untuk aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya.

7. Asas kedinamisan

Merupakan layanan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama selalu bergerak maju tidak menoton, terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu.



8. Asas keterpaduan

Untuk terselenggaranya asas keterpaduan, konselor perlu mengadakan kejasama dengan orang-orang yang dekat dan mengetahui perkembangan diri klien. Dalam hal ini peranan guru, keluarga dan siswa lain sangat menentukan demi teratasinya masalah yang dihadapi klien.

9. Asas Kenormatifan

Usaha bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang ada sehari-hari. Jika masalah yang dihadapi siswa adalah masalah yang melanggar norma, maka konselor harus mengarahkan siswa ke arah yang sesuai dengan norma yang berlaku.

10. Asas Keahlian

Pelayanan bimbingan dan konseling harus dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang profesional, karena usaha bimbingan dilakukan secara teratur dan sistematis dengan menggunakan teknik dan alat yang memadai.

11. Asas Alih Tangan

Jika konselor sudah berusaha membantu klien memecahkan masalah yang dihadapi ternyata tidak berhasil, konselor harus mengalihkan masalah tersebut kepada orang yang lebih ahli. Asas ini bertujuan untuk mengingatkan konselor bahwa masalah yang ditangani harus sesuai dengan kewenangan petugas yang bersangka.

12. Asas Tutwuri Handayani

Asas ini bertujuan agar pelayanan bimbingan dan konseling dirasakan banyak manfaatnya oleh siswa,



bukan pada waktu siswa mengalami masalah saja tetapi di luar proses bimbingan harus ada manfaatnya.

E. Landasan Bimbingan dan Konseling

Membicarakan tentang landasan dalam bimbingan dan konseling pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan landasan-landasan yang biasa diterapkan dalam pendidikan, seperti landasan dalam pengembangan kurikulum, landasan pendidikan non formal atau pun landasan pendidikan secara umum. Landasan Bimbingan dan Konseling menunjukkan urgensi diadakannya BK. Berikut beberapa landasan BK:

1. Landasan Religius

a. Manusia sebagai mahluk Allah

Manusia adalah mahluk Allah yang memiliki sisi-sisi kemanusiaan. Sisi-sisi kemanusiaan tersebut tidak boleh dibiarkan agar tidak mengarah pada hal-hal negatif. Perlu adanya bimbingan yang akan mengarahkan sisi-sisi kemanusiaan tersebut pada hal-hal positif.

b. Sikap Keberagamaan

Agama yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat menjadi isi dari sikap keberagamaan. Sikap keberagamaan tersebut pertama difokuskan pada agama itu sendiri, agama harus dipandang sebagai pedoman penting dalam hidup, nilai-nilainya harus diresapi dan diamalkan. Kedua, menyikapi peningkatan iptek sebagai upaya lanjut dari penyeimbang kehidupan dunia dan akhirat.



c. Peranan Agama

Pemanfaatan unsur-unsur agama hendaknya dilakukan secara wajar, tidak dipaksakan dan tepat menempatkan klien sebagai seorang yang bebas dan berhak mengambil keputusan sendiri sehingga agama dapat berperan positif dalam konseling yang dilakukan agama sebagai pedoman hidup ia memiliki fungsi:

- (1) Memelihara fitrah
- (2) Memelihara jiwa
- (3) Memelihara akal
- (4) Memelihara keturunan

2. Landasan Filosofis

Kata filosofis atau filsafat berasal dari bahasa Yunani: *Philos* berarti cinta dan *sophos* berarti bijaksana, jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Sikun pribadi mengartikan filsafat sebagai suatu “usaha manusia untuk memperoleh pandangan atau konsepsi tentang segala yang ada, dan apa makna hidup manusia dialam semesta ini”. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan mempergunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya, manusia juga belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, semua itu terjadi berkat individu tersebut telah belajar dari apa yang telah dilihat dan didengarnya. Selain itu manusia juga disebut makhluk, di tinjau dari Islam pengertian makhluk ini memberikan pemahaman bahwa ia terikat pada Khaliknya atau Penciptanya, yaitu keterikatan sebagaimana menjadi dasar penciptaan



manusia itu sendiri. Manusia juga makhluk yang tertinggi dan termulia derajatnya dan paling indah diantara segenap makhluk ciptaan Sang Pencipta. Maka dari itu manusia bisa dijadikan pemimpin bagi makhluk lainnya. Apabila manusia memiliki ketidaksempurnaan dan kelemahan maka akan terjadi pembalikan dari yang tertinggi derajatnya menjadi yang terendah derajatnya.

3. Landasan Historis

Secara umum, konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah. Sejarah tentang pengembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno. Mereka menekankan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menguatkan individu melalui pendidikan. Plato dipandang sebagai koselor Yunani Kuno karena dia telah menaruh perhatian besar terhadap masalah-masalah pemahaman psikologis individu seperti menyangkut aspek isu-isu moral, pendidikan, hubungan dalam masyarakat dan teologis.

a. Perkembangan BK di Barat

Sampai awal abad ke-20 belum ada konselor disekolah. Pada saat itu pekerjaan-pekerjaan konselor masih ditangani oleh para guru. Gerakan bimbingan disekolah mulai berkembang sebagai dampak dari revolusi industri dan keragaman latar belakang para siswa yang masuk kesekolah-sekolah negeri. Tahun 1898 Jesse B. Davis, seorang konselor di Detroit mulai memberikan layanan konseling pendidikan dan pekerjaan di SMA. Pada tahun 1907



dia memasukkan program bimbingan di sekolah tersebut.

b. Perkembangan BK di Indonesia

Layanan BK di industri Indonesia telah mulai dibicarakan sejak tahun 1962. ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan di SMA yakni dengan adanya program penjurusan, program penjurusan merupakan respon akan kebutuhan untuk menyalurkan siswa kejurusan yang tepat bagi dirinya secara perorangan. Puncak dari usaha ini didirikan jurusan Bimbingan dan penyuluhan di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Negeri, salah satu yang membuka jurusan tersebut adalah IKIP Bandung (sekrang berganti nama Universitas Pendidikan Indonesia).

Secara resmi BK di programkan di sekolah sejak diberlakukan kurikulum 1975, tahun 1975 berdiri ikatan petugas bimbingan Indonesia (IPBI) di Malang. Penyempurnaan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Selanjutnya UU No. 0/1989 tentang Sisdiknas membuat mantap posisi bimbingan dan konseling yang kian diperkuat dengan PP No. 20 Bab X Pasal 25/1990 dan PP No. 29 Bab X Pal 27/1990 yang menyatakan bahwa “Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Perkembangan BK di Indonesia semakin mantap dengan berubahnya 1 PBI menjadi ABKIN (Asuransi Bimbingan dan Konseling Indonesia) tapa tahun 2001.



4. Landasan Psikologis

Landasan psikologis dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan (klien). Terkadang ada tingkah laku yang sejalan dengan norma dan ada yang jauh dari norma agama. Maka dari itu kita harus mengaitkan semua itu dengan norma-norma yang tepat dalam ajaran Islam. Jika klien memiliki tingkah laku yang jauh dari norma, maka solusi apa yang kita berikan padanya, misalnya kita memberikan pengertian tentang akhlak-akhlak terpuji yang di sukai Allah atau sebaliknya, sehingga dia dapat mengambil kesimpulan sendiri dan mengerti apa yang harus dia lakukan kedepannya. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

5. Landasan Sosial Budaya

Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat dimana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan kontelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia-dunia kerja, perkembangan komunikasi dan lain-lain. MC Daniel memandang setiap anak, sejak lahirnya harus memenuhi tidak hanya tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya ditempat ia hidup, tuntutan Budaya itu menghendaki agar ia mengembangkan tingkah lakunya sehingga sesuai dengan pola-pola yang dapat diterima dalam budaya tersebut.



6. Landasan Ilmiah dan Teknologi

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan professional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaan kegiatannya, maupun pengembangan pengembangan layanan itu secara berkelanjutan.

F. Bidang Bimbingan Pribadi, Sosial, Belajar dan Karier

1. Bimbingan Pribadi

Merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam hal memecahkan masalah-masalah yang sangat kompleks dan bersifat rahasia/pribadi sekali misalnya, masalah keluarga, persahabatan, cita-cita, dan sebagainya. Merupakan bimbingan yang diberikan pada individu dalam menghadapi pergumulan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, pengaturan nafsu seksual, dan sebagainya.

2. Bimbingan Sosial

Bimbingan pribadi-sosial merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh seorang ahli kepada individu atau kelompok, dalam membantu individu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi-sosial, seperti penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan.



3. Bimbingan Belajar

Bimbingan belajar adalah layanan bimbingan yang diberikan pada siswa untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Tujuan layanan bimbingan Belajar

- a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang.
- b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik secara optimal.
- c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya.
- d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.

4. Bimbingan Karier

Bimbingan karier adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membantu individu (peserta didik) dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk didalamnya berupaya mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan.

Dari uraian di atas bahwa bimbingan karier adalah suatu upaya bantuan terhadap peserta didik agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerjanya, mengembangkan masa depan sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakekatnya



merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling bisa berperan dalam peningkatan mutu pendidikan, harus dimulai dari tiga hal yang bisa menjadi indikator dari kesuksesan pendidikan itu sendiri, yakni administrasi sekolah, pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan, dan tentu saja hasil yang diperoleh oleh siswa. Adapun prinsip bimbingan yang harus berpusat pada individu yang dibimbingnya dan diarahkan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan mengatasi kesulitan kesulitan yang dihadapinya. Asas-asas dalam bimbingan konseling yaitu Asas Kerahasiaan, Asas kesukarelaan, Asas keterbukaan, Asas kemandirian, Asas kegiatan, Asas kedinamisan , Asas keterpaduan , Asas Kenormatifan, Asas Keahlian, Asas Alih Tangan, Asas Tutwuri Handayani. Selain asas, bimbingan konseling juga memiliki landasan yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan landasan-landasan yang biasa diterapkan dalam pendidikan, seperti landasan dalam pengembangan kurikulum, landasan pendidikan non formal atau pun landasan pendidikan secara umum. Terdapat 4 bidang bimbingan konseling yaitu Bimbingan Pribadi, Bimbingan Sosial, Bimbingan Belajar dan Karier.





Bab 4

Administasi Sekolah

A. Pengertian Administrasi Sekolah

Administrasi pendidikan merupakan suatu proses kerja sama mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga bisa memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi secara umum pengertian administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Lebih singkatnya, definisi administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan.

a. Pengertian Administrasi Pendidikan Menurut Para Ahli

1. Menurut Depdiknas RI

Administrasi pendidikan adalah suatu keseluruhan proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan, dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, dan spiritual demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.



2. M. Ngalim Purwanto (2003: 3-4)

Menurut M. Ngalim Purwanto, Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material, yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan.

3. Good Carter V

Menurut Good Carter V, Administrasi pendidikan adalah segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

4. Knezevich

Menurut Knezevich, Administrasi pendidikan adalah suatu proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi dan penyatuan tenaga-tenaga dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Drs. M. Ngalim Purwanto

Menurut Drs. M. Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan adalah seluruh proses pengarahan dan integrasi segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material yang berkaitan dengan tercapainya tujuan pendidikan.

6. Dasuqi dan Somantri

Menurut Dasuqi dan Somantri, Administrasi Pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.



7. Oteng Sutisna

Menurut Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan adalah suatu upaya mengkoordinasikan kegiatan yang saling bergantung dari orang-orang dan kelompok-kelompok dalam mencapai tujuan bersama pendidikan anak-anak.

8. Hadari Nawawi

Menurut Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama dalam lembaga pendidikan formal.

b. Tujuan Administrasi Pendidikan

Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergiovanny dan Carver, ada empat tujuan administrasi, diantaranya yaitu:

- 1) Efektivitas produksi.
- 2) Efisiensi.
- 3) Kemampuan menyesuaikan diri.
- 4) Kepuasan Kerja.

Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Contohnya, sekolah berfungsi untuk mencapai



efektivitas produksi, yakni menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin dengan menggunakan kemampuan dana, tenaga seminimal mungkin namun memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya dan bisa menyesuaikan dirinya dengan sekolah yang baru. Kemudian setelah menyelesaikan semua studinya mereka bisa mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa, tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya bisa dilakukan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan nasional.

Selain itu, ada pendapat lain menyatakan bahwa administrasi pendidikan bertujuan agar:

- 1) Tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan.
- 2) Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan.
- 3) Terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan.
- 4) Terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disiplin dan berpedoman pada linieritas keilmuan.

c. Fungsi Administrasi Pendidikan

Berikut ini fungsi administrasi pendidikan diantaranya yaitu:



- 1) Perencanaan (*Planning*). Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian merupakan kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerja antar individu. Maka, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud.
- 3) Kordinasi (*Coordinating*). Kordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam bertindak. Dengan kata lain, kordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif.
- 4) Komunikasi (*Comunicating*). Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud, baik secara tertulis maupun lisan.
- 5) Pengawasan (*Supervision*). Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan, proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai.
- 6) Kepegawaian (*Staffing*). Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu yaitu orang-orang yang



memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan.

- 7) Penganggaran (*Budgeting*). Budgeting adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan.
- 8) Penilaian (*Evaluating*). Tujuan kegiatan evaluasi yaitu untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan.

d. Tugas Administrasi Pendidikan

Adapun tugas administrasi pendidikan diantaranya yaitu:

- 1) Berusaha agar pendidikan tampil secara formal dengan jalan merumuskan, menyelesaikan, menjabarkan dan menetapkan tujuan pendidikan yang akan dicapai sesuai dengan lembaga atau organisasi pendidikan yang bersangkutan secara formal.
- 2) Menyebarluaskan dan berusaha menanamkan tujuan pendidikan kepada anggota lembaga, sehingga tujuan pendidikan tersebut menjadi kebutuhan dan pendorong kerja para anggota lembaga.
- 3) Memilih, menyeleksi, menjabarkan dan menetapkan proses berupa tindakan, kegiatan, dan pola kerja yang diperhitungkan dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.



- 4) Mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dan lainnya dengan memantau memeriksa dan mengendalikan setiap kegiatan dan tindakan pada setiap proses sistem. Upaya ini sering dikaitkan dengan pengawasan melekat ataupun pengendalian mutu dalam pendidikan.
- 5) Menilai hasil yang sudah dicapai dan proses yang sedang atau sudah berlaku, mengupayakan agar informasi mengenai hasil dan proses itu menjadi umpan balik yang bisa memperbaiki proses dan hasil selanjutnya.

e. Prinsip Administrasi Pendidikan

Suatu administrasi pendidikan harus berpegang pada prinsip tertentu, sebagai pijakan dasar dan pedoman dalam bertindak. Adapun prinsip administrasi pendidikan diantaranya yaitu:

1. Prinsip Efisiensi

Seorang administrator profesional harus mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengelola aktivitas pengadministrasian dan tindakan terbebani oleh biaya tinggi. Penghamburan biaya dan penghabisan waktu yang tidak menentu menunjukkan pengelolaan administrasi yang buruk, sehingga akan berdampak negatif dan merugikan kepentingan internal institusinya dan kepentingan eksternal yang dilayaninya.

2. Prinsip Pengelolaan

Administrator merupakan manajer yang bekerja dengan langkah manajemen yang baik mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan begitu, target yang dituju mudah dicapai dengan baik. Perencanaan yang dilakukan



berpihak pada visi dan misi yang jelas sehingga program-program yang dijadwalkan dibuat secara hierarkis atau sistematis dan mendahulukan segala prioritas sebagaimana mengatur dan menjadwalkan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

3. Prinsip Pengutamakan Tugas Pengelolaan

Administrator bertanggung jawab dan berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya. Pelaksanaan tugas tidak didasarkan pada pesan sponsor, tapi atas dasar segala prioritas. Apabila prinsip ini dilanggar, prinsip efisiensi akan terabaikan bahkan hanya akan memboroskan biaya. Pelaksanaan yang diluar tanggung jawab administrator hanya akan kejalinan seluruh tugas administratif yang ujungnya tugas pengelolaan tidak terkontrol dengan baik dan benar.

4. Prinsip Kepemimpinan Yang Efektif

Seorang pemimpin wajib mengembangkan hubungan baik dengan semua bawahannya atau cerdas merealisasikan human relationship. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menyalahkan bawahan, melainkan mengingatkan dan menyarankan. Sebaliknya, bawahan yang baik tidak pernah menggugat dan gusar pada atasan, tapi meluruskan dan meluruskan sepanjang masih dalam konteks profesionalitas yang ada diatas aturan yang disepakati. Dengan begitu, semua bekerja atas kesadaran penuh, ikhlas dan tidak merasa ditekan atau dipaksa. Kesadaran sangat berperan dalam pencapaian kesuksesan kepemimpinan dan sistem administrasi. Gaya kepemimpinan tepat jika administrator memperhitungkan taraf kematangan para



anggota organisasi dan situasi yang ada. Apabila dalam organisasi sudah ada hubungan baik, namun kesadaran bekerja belum memadai, pemimpin yang berhasil harus mampu menimbulkan kesadaran untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya.

5. Prinsip Kerjasama

Pengembangan kerjasama dilakukan secara sinergis, profesional, proporsional. Administrator mengerti jenis pekerjaan yang diembankan, mengerti apa yang dikerjakan sebagai tugas dan keahliannya. Untuk mencapai kinerja yang sinergis, dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan dan kepribadian setiap orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas tersebut.

f. Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan

Berikut ini beberapa bidang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan, diantaranya:

- 1) Bidang Tata Usaha Sekolah
 - a) Organisasi dan struktur pegawai tata usaha
 - b) Anggaran belanja keuangan sekolah
 - c) Masalah kepegawaian dan personalia sekolah
 - d) Keuangan dan pembukuan
 - e) Korespondensi/ surat menyurat



f) Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, raport, dan sebagainya

2) Bidang Personalia Murid

- a. Organisasi murid
- b. Masalah kesehatan murid
- c. Evaluasi kemajuan murid
- d. Masalah kesejahteraan murid
- e. Bimbingan dan konseling untuk murid

3) Bidang Personalia Guru

- a. Pengangkatan dan penempatan guru
- b. Organisasi person guru
- c. Masalah kepegawaian
- d. Masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru
- e. Refreshing dan upgrading guru

4) Bidang Pengawasan (Supervisi)

- a. Upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha.
- b. Mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah.
- c. Mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran.
- d. Upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru.



- 5) Bidang Pelaksanaan dan Pembinaan Kurikulum
 - a. Berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah, dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran.
 - b. Melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya, sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat.

B. Fungsi Administrasi Secara Khusus

Prajudi Atmosudirdjo (1991:112) menyebutkan bahwa dalam administrasi terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Rancangan semesta dari usaha
2. Pengorganisasian dasar
3. Pengembangan kelompok/staf pimpinan
4. Management administrasi
5. Tata usaha
6. Pengendalian dan pengawasan

Administrator secara luas berfungsi terlibat dalam suatu set umum untuk tujuan organisasi ini fungsi dari administrasi yang dikembangkan oleh Henry Fayol yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Mengarahkan (*commanding*)



4. Pengkoordinasian (*coordinating*)

5. Kontrol (*controlling*)

Beberapa fungsi administrasi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, selain itu administrasi merupakan suatu proses kegiatan dari beberapa orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta memakai prosedur prosedur tertentu. Istilah fungsi sering kita jumpai dalam suatu organisasi, yaitu suatu yang menjadi bagian serta memegang peranan dalam suatu organisasi pemerintah maupun swasta. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh W.J.S Poerwadarminta dalam buku kamus umum bahasa indonesia yang antara lain menjelaskan bahwa: Fungsi merupakan suatu yang menjadi bagian atau yang memegang peranan penting dalam suatu wadah yang mengakibatkan suatu hal atau peristiwa. Definisi tersebut diatas menggambarkan bahwa fungsi merupakan suatu keterkaitan antara berbagai komponen atau bagian-bagian yang mempunyai tugas yang berbeda-beda satu sama lain, dalam satu kesatuan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan yang di tentukan sebelumnya. Berkaitan dengan pembahasan ini maka fungsi yang dimaksudkan disini adalah fungsi administrasi sekolah satu atap Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong (Parigi Moutong). Dengan demikian dalam hubungannya dengan tujuan untuk menunjang proses belajar mengajar, yang didalamnya terdiri berbagai bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian yang lain, terdapat saling keterkaitan yang secara bersamaan menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apabila satu bagian mengalami hambatan maka akan berpengaruh terhadap bagian yang



lain, dengan demikian didalam proses belajar mengajar di bidang pendidikan diperlukan adanya kerjasama yang erat tenaga guru, orang tua wali murid dan staf tenaga administrasi yang ada di sekolah tersebut. The Liang Gie (1982) menyatakan setidaknya fungsi mencakup tiga hal :

1. Fungsi meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Fungsi dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Merupakan konsep tentang yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Fungsi juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Fungsi administrasi menurut Nigro/nigro (1992) mengemukakan fungsi fungsi administrasi dapat dilihat dari fungsi fungsi administrasi yang dikemukakan oleh Fayol yaitu *Planning, Organizing, Commanding, Coordinating dan Controlling*. Selain dari itu Nigro/nigro juga mengemukakan bahwa fungsi- fungsi administrasi public dapat dilihat dari pendapat Gulick tentang adanya 7 fungsi administrative yang terkenal dengan akronim, POSDCORB yaitu :

1. *Planning* (perencanaan), yaitu mengembangkan adananya garis-garis besar kegiatan yang dilakukan dan mengembangkan metode metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. *Organizing* (pengorganisasian), mengembangkan struktur formal dari wewenang berdasarkan pengelompokan-pengelompokan kerja misalnya departemen, biro, dinas dan lain-lain, yang perlu dikoordinasikan.



3. *Staffing* yang meliputi keseluruhan fungsi kepegawaian: merekrut dan melatih staf serta memelihara kondisi-kondisi kerja yang menyenangkan.
4. *Directing* (pengarahan), yang meliputi tugas memimpin organisasi dengan membuat keputusan keputusan dan mengimplementasikannya melalui kebijakan-kebijakan prosedur.
5. *Coordinating* (*pengkoordinasian*), yang meliputi tugas-tugas mengintegrasikan dan menyelenggarakan berbagai macam unit (bagian) yang saling berkaitan.
6. *Reporting* (pelaporan), yang merupakan proses dan teknik untuk memberikan informasi tentang pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan misalnya koleksi data dan manajemen informasi.
7. *Budgeting* (penganggaran), yang meliputi tugas tugas perencanaan *fiscal accounting*, dan pengendalian.

C. Kegiatan-Kegiatan Administrasi Guru di Sekolah

Pada umumnya kita mengetahui bahwa tugas guru yang utama adalah mengajar atau mendidik. Tetapi agar tugas tersebut mampu mencapai tujuannya yakni tujuan pendidikan, guru harus melibatkan diri dalam masalah-masalah administratif. Dalam hubungannya dengan administrasi sekolah inilah guru berfungsi sebagai administrator. Sebagai administrator seorang guru dituntut bekerja secara administratif dan teratur. Segala pelaksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang



dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya merupakan dokumen yang berharga bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam buku Pedoman Administrasi Dan Supervisi yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1978,hal.4) tertulis tugas dan tanggung jawab guru sebagai administrator adalah sebagai berikut:

1. Menguasai program pengajaran (garis-garis besar program).
2. Menyusun program kegiatan mengajar.
3. Menyusun model satuan pelajaran dan pembagian waktu.
4. Melaksanakan tatusaha kelas, antara lain pencatatan data murid.

Demikianlah tugas guru amat kompleks, guru dituntut harus berpartisipasi dalam administrasi sekolah. Guru harus ikut memperhatikan kepentingan-kepentingan sekolahnya, baik yang bersifat kurikuler maupun masalah-masalah di luar kurikulum. Suatu pembaruan pendidikan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan tanpa keikutsertaan guru secara optimal. Tentu saja yang dimaksud keikutsertaan disini adalah dalam program kurikuler dan juga bukan kurikuler, kegiatan edukatif dan administratif. Perlu diperhatikan bahwa fungsi guru sebagai administrator akan terdapat perbedaan jika guru itu sebagai guru kelas di Sekolah Dasar dibandingkan dengan guru bidang studi di sekolah lanjutan. Sekarang kita tinjau atas dasar komponen administrasi sekolah yang telah kita bahas pada sebelumnya. Apa yang dapat diperbuat oleh guru terhadap kedelapan bidang yang menjadi ruang lingkup administrasi sekolah adalah sebagai berikut:



1. Dalam bidang administrasi kurikulum, antara lain:
 - a. Menyusun program mengajar sesuai dengan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) dalam kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyusun model satuan pembelajaran beserta pembagian waktunya (kadang-kadang disebut sebagai persiapan mengajar).
 - c. Merencanakan dan melaksanakan program evaluasi pendidikan (tes formatif, tes sumatif, ujian akhir) termasuk membuat laporan hasil evaluasi (penilaian).
 - d. Memberikan bimbingan belajar kepada murid termasuk penyuluhan.
 - e. Melancarkan pembagian tugas mengajar dan penjadwalan.
 - f. Mempertimbangkan perbaikan kurikulum untuk disesuaikan dengan kondisi setempat.
2. Dalam bidang administrasi personil, antara lain:
 - a. Memperlancar program supervisi pendidikan.
 - b. Membantu pengisian identitas pegawai.
 - c. Membantu memperlancar kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam kepegawaian seperti kenaikan pangkat (promosi), kepindahan (mutasi, pemberhentian (pensiun), pemberhentian (pemecatan), cuti, dan sebagainya.
3. Dalam bidang administrasi kesiswaan (murid), antara lain:



- a. Menjadi panitia penerimaan siswa baru .
 - b. Mempertimbangkan syarat kenaikan kelas atau lulusan.
 - c. Menyusun tata tertib sekolah (tata tertib siswa).
 - d. Mengisi nilai raport pada buku induk siswa
 - e. Pengaturan kehadiran siswa (pencatatan kehadiran siswa).
 - f. Membantu mengawasi dan membimbing organisasi siswa.
4. Dalam bidang administrasi tatalaksana (tatausaha) sekolah, antara lain:
- a. Membantu penyusunan kalender sekolah.
 - b. Berpartisipasi dalam rapat-rapat sekolah.
 - c. Menyusun peraturan dan penyelenggaraan perpustakaan sekolah.
 - d. Berpartisi dalam program kesejahteraan guru dan pegawai (masalah gaji, pengobatan, kesehatan, dan sebagainya).
 - e. Berpartisipasi dalam kegiatan upacara sekolah.
 - f. Membantu kelancaran ketata usahaan sekolah.
5. Dalam bidang administrasi sarana pendidikan, antara lain:
- a. Inventarisasi alat peraga pada bidang studi masing-masing.



- b. Merencanakan dan mengusahakan buku pegangan baik untuk guru maupun murid.
 - c. Mengatur penggunaan laboratorium sekolah.
 - d. Membantu pengadministrasian buku-buku perpustakaan.
 - e. Membantu memelihara atau merawat dan mengawasi segala fasilitas sekolah termasuk fasilitas pelajaran baik dari segi kebersihan, kesehatan, dan keamanannya.
6. Kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas), antara lain:

Dalam hal ini guru sebagai salah satu warga sekolah dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif agar dalam menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan pihak luar tercapai dan terbina dengan baik. Beberapa bentuk kegiatan hubungan masyarakat yang melibatkan guru antara lain:

- a. Menyusun laporan pendidikan untuk instansi atasan atau juga kepada orang tua siswa.
 - b. Rapat bersama dengan orang tua murid.
7. Dalam bidang administrasi keuangan, antara lain:
- a. Membantu memperlancar pemasukan uang SPP.
 - b. Membantu mencatat keuangan di sekolah dari berbagai jenis kegiatan pendidikan.
 - c. Membantu Kepala sekolah dalam hal SPJ (Surat Pertanggung Jawaban).



8. Dalam bidang pengorganisasian sekolah, antara lain:
 - a. Membantu Kepala Sekolah dalam menyusun rincian tugas (*Job description*).
 - b. Membantu pengembangan organisasi di sekolah.

Secara Umum Guru pada kegiatan administrasi guru di sekolah antara lain menyusun berberapa administrasi antara lain :

D. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Suatu kegiatan pembelajaran, diperlukan sebuah rencana agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Berikut dijelaskan beberapa hal mengenai RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus (Kunandar, 2011: 263).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa “Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah: Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk: (1)



mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar-mengajar; (2) dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana (Kunandar, 2011: 264). Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar (kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien (Kunandar, 2011: 264).

Langkah-langkah menyusun RPP (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007) adalah:

- a. Menuliskan Identitas Mata Pelajaran, yang meliputi: sekolah; mata pelajaran, tema; kelas/semester; alokasi waktu.
- b. Menuliskan Standar Kompetensi. SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran.
- c. Menuliskan Kompetensi Dasar. KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi.
- d. Menuliskan Indikator Pencapaian Kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.



- e. Merumuskan Tujuan Pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan Indikator yang telah ditentukan.
- f. Materi Ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
- g. Alokasi Waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.
- h. Menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan.
- i. Penilaian Hasil Belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian.
- j. Menentukan Media/Alat/Bahan/Sumber Belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

E. Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang



mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Kunandar, 2011: 244). Sedangkan silabus menurut Yulaelawati adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Trianto, 2010:96).

Langkah-langkah pengembangan silabus (Trianto, 2010: 99):

- a. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi.
- b. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian KD.
- c. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan



pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD.

- d. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
- e. Menentukan Jenis Penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis.
- f. Menentukan Alokasi Waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam.
- g. Menentukan Sumber Belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

Manfaat Silabus

Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem



penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, rencana pembelajaran untuk satu Standar Kompetensi maupun satu Kompetensi Dasar. Silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian.

Isi Silabus

1. Identitas mata pelajaran
2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
3. kompetensi inti,
4. kompetensi dasar
5. tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A/dll);
6. materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan.
7. penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi
8. alokasi waktu



9. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik

Prinsip Pengembangan Silabus

1. Ilmiah, Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
2. Relevan; Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.
3. Sistematis; Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.
4. Konsistensi; Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.
5. Kecukupan; Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
6. Aktual & Kontekstual; Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.



7. Fleksibel; Keseluruhan komponen silabus dapat mengako-modasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.
8. Menyeluruh; Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (Kognitif, afektif, Psikomotor) atu sesuai degan esensi mata pelajaran masing masing.

Berdasarkan pemaparan di atas, Administrasi pendidikan adalah suatu proses pengintegrasian segala usaha kerja sama untuk mendayagunakan sumber-sumber personel dan material sebagai usaha untuk meningkatkan pengembangan kualitas manusia secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti hasil yang dicapai upaya, sama dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien berhubungan dengan penggunaan sumber dana, daya, dan waktu. Sumber adalah segala sesuatu yang membantu tercapainya tujuan baik berupa tenaga, material, uang, ataupun waktu. Prinsip dari administrasi pendidikan adalah mengutamakan pengelolaan tugas bidang administrasi secara efektif dan efisien serta menjalin hubungan kerja sama dengan orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan tidak lain adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain administrasi digunakan di dalam dunia pendidikan adalah agar tujuan pendidikan tercapai. Bidang yang tercakup dalam ruang lingkup administrasi pendidikan adalah bidang tata usaha sekolah, bidang personalia murid, bidang personalia guru, bidang pengawasan, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Kesemuanya



dikelompokkan dalam bidang material, personel, dan kurikulum.





Bab 5

Supervisi Pendidikan

A. Perlunya Pembinaan Guru

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat dan menjalankan pekerjaan tersebut.

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini di jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus memiliki kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia



Nasanius, Y. mengatakan profesi guru yaitu kemampuan yang tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain:

- a. sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing dan melatih
- b. pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki,
- c. sebagai petugas kemaslahatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik.

Galbreath mengatakan bahwa profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pembinaan profesi guru adalah tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik guna memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu.

a. Pengembangan Profesi

Dalam garis besar bentuk pendidikan untuk profesi guru dibagi menjadi dua garis besar, yaitu *pre-service education*



dan *in-service education*. Program *pre-service education* adalah program pendidikan yang dilakukan pada pendidikan sekolah sebelum peserta didik mendapatkan tugas tertentu dalam suatu jabatan. Lembaga penyelenggara program *pre-service education* ini adalah pendidikan tinggi. Universitas yang menyediakan program ini berkenaan dengan kurikulum pendidikan guru dan kemitraan dengan sekolah dengan membekali mahasiswa calon guru dengan pengetahuan dan keterampilan formal kependidikan dan pengetahuan tentang sekolah.

Program *in-service education* adalah program pendidikan yang mengacu pada kemampuan akademik maupun profesional sesudah peserta didik mendapatkan tugas tertentu dalam suatu jabatan. Orang tersebut berusaha meningkatkan kinerjanya melalui pendidikan lanjut yang berijazah S-1, ke S-2, dan S-3 pada jurusan tertentu yang relevan.

Adapun upaya pemerintah untuk persiapan guru, salah satu langkah pemerintah bersama Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru adalah dengan mengadakan sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru (PPG). PPG adalah program pendidikan setelah S-1 yang mencakup keahlian khusus yang terkait dengan kompetensi guru. PPG ini bertujuan untuk meningkatkan mutu para tenaga pendidik.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi ini bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan



pendidikan nasional yang bermutu. Adapun perbedaan antara sertifikasi dengan PPG adalah:

- (1) PPG diperuntukkan bagi calon guru atau new entry.
- (2) Program sertifikasi dilaksanakan oleh guru-guru yang telah menjalani profesinya sebagai guru dan harus memenuhi persyaratan yang ada agar dapat menjaga profesionalitasnya sebagai guru.

b. Pengembangan Kompetensi Guru

- 1) Pengembangan Kompetensi Guru Berdasarkan Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru (1976).

Sekolah Pendidikan Guru (SPG) berfungsi mempersiapkan calon guru untuk mampu mengajar pada sekolah dasar. Jadi SPG menyelenggarakan program pendidikan pada tingkat pre-service. Dalam kurikulum SPG tahun 1976 BAB 3 Pasal 4, dikemukakan tujuan umum pendidikan SPG sebagai berikut:

- a) Sehat jasmani dan rohani
- b) Menjadi warga negara yang bermoral Pancasila yang memiliki sifat-sifat baik

c) Memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang baik

1. Pengembangan Kompetensi Guru Berdasarkan Program Penataran Guru Sekolah Dasar (1977/1978).
2. Peranan LPTK dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Para Guru.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai suatu lembaga pendidikan guru tingkat universitas



mempunyai fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan para calon guru yang kelak mampu melakukan tugasnya selaku profesional pada sekolah menengah tingkat pertama (SLTP) dan sekolah menengah tingkat atas (SLTA)

B. Pengertian dan Fungsi Pokok Supervisi

1. Pengertian supervisi

Pengertian supervisi sangat luas, sebagaimana disebutkan Drs, M. Ngalim Purwanto dalam bukunya *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya disebutkan, dengan kata lain supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para gurudan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Secara harfiah kata supervisi sama dengan membangun, meningkatkan atau memperbaiki (Wojowasito, 1980 : 52). Dalam kegiatan sehari-hari disekolah kata supervisi selalu diartikan dengan supervisi pengajaran, Menurut penjelasan UUSPN Tahun 1989 UUSPN Pasal 52 kata supervisi dimasukan dalam rangkaian kata supervisi, yaitu: “Pengawas lebih merupakan upaya untuk memberikan bimbingan supervisi, dorongan, dan pengayoman bagi satuan pendidikan yang bersangkutan yang diharapkan terus-menerus dapat terus meningkatkan mutu pendidikan maupun pelayanannya”.

Dalam Carter Good Goveremance Dictionary of Education mengemukakan bahwa supervisi adalah segala usaha pejabat dalam memimpin guru-guru dan tenaga



kependidikan lainnya, untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan jabatan-jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran.

Dalam sudut pandang morfologis, “superervisi” terdiri dari dua kata yaitu “super” yang berarti atas atau lebih dan “visi” mempunyai arti lihat, pandang, tilik, atau awasi. Dari dua kata tersebut (super dan visi), dapat dimaknai beberapa substansi supervisi sebagai berikut:

- a. Kegiatan dari pihak atasan yang berupa melihat, menilik, dan menilai serta mengawasi dari atas terhadap perwujudan kegiatan atau hasil kerja bawahan.
- b. Suatu upaya yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki pandangan yang lebih tinggi berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap untuk membantu mereka yang membutuhkan pembinaan.
- c. Suatu kegiatan untuk mentransformasikan berbagai pandangan inovatif agar dapat diterjemahkan dalam bentuk kegiatan yang terukur.
- d. Suatu bimbingan professional yang dilakukan oleh pengawas agar guru-guru dapat menunjukkan kerja professional.

Sementara itu Prof. Piet A. Sahertian Mengutip dari Mc Nerney (1951 : 1) yang melihat supervisi itu sebagai sebuah prosedur member arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Sedangkan menurut Burton dan Bruckner (1955 :1) supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Lebih luas lagi Kimbal Wiles yang menjelaskan bahwa



supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik. Perkembangan konsep supervisi pendidikan selanjutnya sudah menuju sasaran yang khusus, yang membedakan supervisi pendidikan dalam pengertian yang luas dan supervisi dalam batasan yang spesifik, yaitu pengajaran.

Demikian beberapa pengertian supervisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, kesimpulannya seiring perkembangannya supervisi secara garis besar adalah upaya yang dilakukan oleh pimpinan sekolah dalam mengobservasi dan meningkatkan seluruh komponen yang terlibat dalam pendidikan (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan).

2. Fungsi Pokok Supervisi

Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran, Franseth Jane dan Ayer sama-sama mengemukakan bahwa fungsi utama supervise adalah membina program pengajaran yang ada sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan.

Sementara Burton & Bruckner 1955 : 3 menjelaskan bahwa fungsi supervisi modern ialah menilai dan memperbaiki factor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, sedangkan Briggs mengungkapkan fungsi utama supervise bukan perbaikan pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mendorong kearah pertumbuhan profesi guru.



Swearingen dalam bukunya *Supervision of Instruction Foundation and Dimension* (1961) mengemukakan 8 fungsi supervisi:

- 1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah
- 2) Melengkapi kepemimpinan sekolah
- 3) Memperluas pengalaman guru guru
- 4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif
- 5) Memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus
- 6) Menganalisis situasi belajar mengajar
- 7) Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf
- 8) Member wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.

William H. Lucio (1969 : 8) menjelaskan tentang fungsi supervisi profesional sebagai berikut : "The chief function of supervision is to make possible to help teachers to help themselves become more skilled in the processes of fostering children's learning" Dalam Pedoman Pelaksanaan Kurikulum SD dan Sekolah Menengah (Depdikbud), 1975) pengertian supervisi adalah: sebagai bantuan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.

C. Tanggung Jawab Pembinaan Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru tidak lepas dari proses pembinaan guru baik pembinaan langsung oleh kepala sekolah dan pengawas atau juga oleh Pusat-pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan



(P4TK). Permasalahan peningkatan mutu guru tidak hanya dapat diselesaikan dengan memberikan gaji dan kesejahteraan yang cukup, tapi perlu juga dilakukan upaya-upaya pembinaan kompetensi guru, hal ini sangat penting karena perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, sehingga menuntut guru untuk terus menerus "*mengabgrid*" dirinya sehingga dapat mengikuti atau bahkan membuat suatu rekayasa teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Prioritas inovasi pendidikan dan latihan dimaksudkan agar guru dapat mengimbangi perubahan di dalam tugasnya, sehingga jadi profesional.

Secara umum tujuan pembinaan guru adalah meningkatkan mutu pendidikan dalam arti yang luas, dan secara khusus untuk meningkatkan profesional guru dengan membentuk kelompok Kerja Guru. Tujuan Kelompok Kerja Guru menurut Depdikbud (2005: 3) adalah meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kependidikan yang tersedia. Maka dalam rangka mencapai tingkat kulaitas yang diharapkan tersebut, perlu di lakukan pembinaan intensif terhadap guru. Pembinaan kemampuan profesional guru dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada guru terutama bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dorongan, sehingga nantinya guru diharapkan mampu menguasai bidang studi yang dibinanya, memiliki keterampilan teknik mengajar yang baik, melaksanakan proses belajar mengajar dengan sempurna serta bisa mengukur hasil belajar peserta didik dengan tepat.

Pembinaan profesionalisme guru yang berfokus kepada ke empat kompetensi utama sebagaimana disebutkan di



atas harus terintegrasi dengan konsepsi pendidikan nilai. Dalam hal pengembangan kompetensi pedagogik misalnya, maka selain guru harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual, serta guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, guru juga harus dibekali bagaimana melakukan proses pendidikan atau pembelajaran yang berbasis pendidikan nilai, berbagai pendekatan dalam pendidikan nilai seperti pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat harus dikuasai oleh guru, sehingga ia tidak sebatas melaksanakan fungsi formalnya, melainkan jauh dari itu sampai kepada upaya-upaya nyata dalam mengembangkan peserta didik yang berkarakter sebagaimana yang diamanahkan UU No 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Demikian halnya dengan pengembangan kompetensi kepribadian guru, prosesnya harus berbasis pada pendidikan nilai, sosok guru yang mampu tampil menjadi pribadi yang utuh, paripurna, insan kamil, warga negara yang baik, dan kaffah sebagaimana yang menjadi tujuan dari pendidikan nilai harus menjadi target dari program pembinaan profesionalisme guru melalui kompetensi kepribadiannya. Begitu pula dalam hal kompetensi sosial, guru professional harus melaksanakan tugasnya dengan berpegang teguh kepada sistem nilai bangsanya serta berusaha untuk menjaga kelestarian tata nilai tersebut melalui upaya-upaya internalisasi nilai bangsanya kepada peserta didik dan rekan kerja yang menjadi partnernya.



Terakhir terkait dengan tuntutan kompetensi professional. Dalam hal ini, terdapat beberapa kompetensi inti sebagai turunan dari kompetensi professional yang harus dimiliki seorang guru, diantaranya menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang menjadi bidangnya, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang menjadi bidangnya, serta mengembangkan materi pembelajaran yang menjadi bidangnya secara kreatif. Dalam konteks pendidikan nilai, maka kompetensi profesional tersebut harus terintegrasi dengan seperangkat konsepsi pendidikan nilai, struktur, konsep, dan pola pikir dalam pendidikan nilai harus menjadi bagian dari kompetensi professional yang dikuasai guru.

D. Pendekatan Supervisi Pendidikan

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor, hal ini tentu lebih memudahkan supervisor ketika mensupervisi bawahannya, supervisor dapat memilih pendekatan mana yang akan digunakan sesuai dengan kondisi lembaga yang bersangkutan, karena setiap pendekatan dalam supervisi pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Pemilihan yang tepat bergantung pada masalah yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk kepentingan yang dimaksud, beberapa pendekatan supervisi yang dikemukakan oleh Wahyudi yaitu:



a. Pendekatan Kolegial

Supervisi kolegial atau yang biasa disebut supervisi rekanan diistilahkan dalam beberapa nama antara lain, *peer supervision*, *cooperative professional development* dan bahkan sering dikatakan *collaborative supervision*. Supervisi kolegial sebagai proses formal moderat dimana dua orang guru atau lebih bekerjasama untuk kepentingan perkembangan profesional guru. Bentuk supervisi kolegial menurut Kimbrough adalah:

- 1) Lokakarya (workshops) yaitu dengan kegiatan kelompok yang terdiri dari Kepala Sekolah.
- 2) Supervisor (Pengawas) dan guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok.

Observasi sesama guru di kelas yaitu dengan melibatkan sesama rekan guru secara bergantian untuk melihat dan menilai kegiatan pembelajaran di kelas dengan keberhasilan dan kekurangannya.

b. Pendekatan Individual

Pendekatan ini disebut dengan wawancara individual yaitu kesempatan yang diciptakan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk bekerja secara individual dengan guru sehubungan dengan masalah-masalah profesionalnya. Pendekatan ini, menekankan pada tanggung jawab pribadi guru terhadap profesionalismenya. Bentuk dari pendekatan ini adalah guru membuat rancangan pembelajaran, selanjutnya disampaikan kepada supervisor, Kepala Sekolah atau pihak lain yang kompeten. Pada akhir semester, biasanya guru dan supervisor bertemu untuk membicarakan kendala yang dihadapi selama



melaksanakan program pembelajaran. Pendekatan ini cocok bagi guru yang lebih suka bekerja sendiri.

c. Pendekatan Klinis

Pendekatan klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang logis dan intensif mengenai penampilan mengajar yang nyata dalam mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.

Ada beberapa tahapan perencanaan supervisi klinis:

- 1) Tahap pertemuan awal, merupakan pembuatan kerangka kerja, karena itu perlu diciptakan suasana akrab dan terbuka antara supervisor dengan guru sehingga guru merasa percaya diri dan memahami tujuan diadakan pendekatan klinis.
- 2) Tahap obsevasi kelas, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai pedoman dan prosedur yang disepakati pada tahap awal. Selanjutnya supervisor melakukan observasi berdasarkan instrumen yang telah dibuat dan disepakati dengan guru. Setelah observasi, sepervisor mengumpulkan informasi untuk membantu guru dalam menganalisis pembelajaran.
- 3) Tahap pertemuan akhir atau balikan, supervisor mengevaluasi hal-hal yang terjadi selama observasi dan seluruh siklus proses supevisi dengan tujuan meningkatkan perfomansi guru. Pertemuan akhir ini merupakan diskusi umpan balik antara suprvisor dan guru. Supervisor memaparkan data objektif sehingga guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan selama pembelajaran berlangsung. Dasar dari



balikan terhadap guru adalah kesepakatan tentang item-item observasi yang telah dibuat sehingga guru menyadari tingkat prestasi yang dicapai.

Ada beberapa ciri-ciri dari supervisi klinis yaitu:

- (a) Hakikatnya supervisor dan guru sederajat saling membantu meningkatkan kemampuan profesionalisme.
- (b) Fokus supervisi klinis pada perbaikan cara mengajar, bukan mengubah kepribadian guru.
- (c) Balikan supervisi klinis didasarkan atas bukti pengamatan.
- (d) Bersifat konstruktif dan memberi penguatan pada pola dan tingkah laku yang telah dicapai.
- (e) Tahapan supervisi klinis merupakan kontinuitas dan dibangun atas pengalaman masa lampau.
- (f) Supervisi klinis merupakan proses memberi dan menerima yang dinamis.
- (g) Guru mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk mengemukakan persoalan menganalisis cara mengajarnya sendiri dan mengembangkannya.
- (h) Supervisor mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi cara melakukan supervise.
- (i) Guru mempunyai prakarsa dan tanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi pedagogik.
- (j) Supervisor dan guru bersifat terbuka dalam mengumpulkan pendapat dan saling menghargai.



d. Pendekatan Artistik Dalam Supervisi Pengajaran

Menurut Good V. Carter, artistik adalah kegiatan manusia yang terarah pada pencapaian suatu tujuan, tetapi dalam pemakaiannya umum terbatas pada kegiatan yang melibatkan kemampuan kreatif kecerdasan pertimbangan dan keterampilan. Pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran adalah setiap bentuk layanan bantuan profesional kepada guru-guru secara individu maupun kelompok dalam rangka perbaikan pengajaran dan perbaikan program kurikulum melalui proses yang memerlukan intuisi, kreatifitas, kecerdasan, keterampilan yang dilakukan oleh supervisor dalam kegiatan supervisi yang belum disepakati secara tertulis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan cara berusaha menyingkap pengajaran sekaligus menjangkau latar belakang guru. Pendekatan ini mempunyai ciri-ciri :

- 1) Menerima kenyataan bahwa supervisor dengan segala kelebihan dan kekurangan, kepekaan dan pengalamannya merupakan instrumen pokok. Dengan kata lain supervisor yang memberikan makna atas segala kegiatan selama proses pembelajaran.
- 2) Memerlukan hubungan yang baik antara supervisor dan guru.

e. Pendekatan Ilmiah

Pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran, artinya memberikan responsi atas



kekurangan-kekurangan dalam menilai efektivitas pembelajaran.

Kekurangan tersebut dapat berupa :

- 1) Kurang tegasnya dan kurang jelasnya standar-standar yang dipergunakan untuk menilai efektif tidaknya pembelajaran dewasa ini.
- 2) Sulit menentukan metode-metode yang paling baik.
- 3) Sulit menentukan guru mana yang mengajar dan melaksanakan tugas yang paling baik.

Dalam pandangan ilmiah, pembelajaran dipandang sebagai ilmu (science), maka perbaikan pembelajaran dapat dilakukan Supervisor dengan menggunakan metode-metode ilmiah, ada beberapa langkah dalam melaksanakan pendekatan ilmiah ini, sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan hasil penemuan para peneliti.
- 2) Dengan hasil temuan peneliti, akan diketahui mana pembelajaran yang efektif dan yang tidak efektif, tentunya penemuan itu berdasarkan pada teori-teori pembelajaran yang teruji. Sehingga Supervisor bisa mencapai sasaran dari supervisi.
- 3) Bersama-sama dengan peneliti mengadakan penelitian di bidang pembelajaran dan hal lainnya yang bersangkutan dengannya.
- 4) Tindakan penelitian harus dilakukan oleh Supervisor bersama-sama pembelajaran dan Supervisor akan mendapat gambaran mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama dengan siswanya.
- 5) Menerapkan metode ilmiah dan mempunyai sikap ilmiah dalam menemukan efektifitas pembelajaran. Sikap ilmiah tersebut, antara lain: jernih dalam memandang persoalan tanpa ada pertensi, menjaga



jarak dalam hal yang diamati, obyektif serta menggunakan kerangka-kerangka yang diakui dalam pendekatan ilmiah.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi mengandung arti yang luas dan demokratis, dengan paradigma baru yang tidak hanya melihat kinerja kepala sekolah guru dan pegawai sekolah saja akan tetapi juga mencari jalan keluar apabila terjadi permasalahan. Para supervisor berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan, hubungan antara pengawas dengan yang diawasi lebih bersifat kemitraan, hubungan komunikasi pun tidak lagi *oneway traffic* tetapi menjadi *twoway traffic*.





Bab 6

Manajemen Berbasis Sekolah

A. Latar Belakang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dalam era otonomi daerah, pendidikan perlu dikelola dengan memperhatikan kepentingan sekolah itu sendiri untuk berkembang secara optimal dan mandiri. Oleh karena itu, Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pilihan yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Definisi komprehensif mengenai Manajemen Berbasis Sekolah yang dikemukakan oleh Malen sebagaimana dikutip Ibtisam Abu Duhou adalah suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya pendidikan dapat didorong dan ditopang.

Selanjutnya, Candoli mendefinisikan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai suatu cara untuk memaksa sekolah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa saja yang terjadi pada anak menurut yurisdiksinya dan mengikuti sekolahnya. Konsep ini menegaskan bahwa ketika sekolah itu sendiri dibebani dengan pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani kebutuhan anak dalam mengikuti sekolah, personil sekolah akan mengembangkan program yang lebih meyakinkan karena



mereka mengetahui kebutuhan belajar siswa. Definisi tentang Manajemen Berbasis Sekolah menegaskan bahwa konsep tersebut mengacu pada manajemen sumber daya di tingkat sekolah dan bukan di suatu sistem atau tingkat yang sentralistik. Melalui MBS, sekolah diberi pengawasan lebih besar atas arah yang akan dicapai oleh organisasi sekolah tersebut. Pengawasan atas anggaran dianggap merupakan inti dari Manajemen Berbasis Sekolah.

Terkait erat dengan kebijaksanaan anggaran adalah pengawasan atas penetapan peran, penggajian, dan pengembangan staf. Pada ekstrim lainnya, beberapa sekolah diberi pengawasan atas kurikulum sebagai bagian dari Manajemen Berbasis Sekolah. Di sini suatu kurikulum berbasis sekolah berarti bahwa masing-masing sekolah memutuskan bahan-bahan ajar apa akan digunakan, dan juga model pelaksanaan spesifik. Para staf menentukan beberapa kebutuhan pengembangan profesional mereka sendiri, serta beberapa struktur di mana proses pendidikan akan dikembangkan. Manajemen Berbasis Sekolah ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan, mengingat prinsip dan kecenderungannya yang mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah pada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan riil sekolah. Oleh karena itu, jika kita semua sedang gencar berbicara tentang reformasi pendidikan, maka dalam konteks MBS, tema sentral yang diangkat adalah isu desentralisasi. Desentralisasi dalam pengertian sebagai pengalihan tanggung jawab pemerintahan pusat dalam hal perencanaan, manajemen, penggalan dana, dan alokasi sumberdaya ke pemerintah daerah.



Terkait dengan desentralisasi, MBS dikembangkan untuk membangun sekolah yang efektif. Hanya saja konsep desentralisasi model MBS mengacu pada sekolah swa-manajemen (*self managing school*) bukan pada penyelenggara sekolah mandiri (*self governing school*). Respon yang muncul atas MBS bermacam-macam. Depdiknas merumuskan pengertian MBS sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Dengan otonomi yang lebih besar, sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Maksud yang sama dikemukakan oleh Miarso yang menyatakan bahwa arti pengelolaan berbasis sekolah ini adalah pelimpahan wewenang pada lapis sekolah untuk mengambil keputusan mengenai alokasi dan pemanfaatan sumber-sumber berdasarkan aturan akuntabilitas yang berkaitan dengan sumber tersebut. Asumsi kebijakan manajemen berbasis sekolah adalah bahwa dengan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang meningkat ke sekolah, serta proporsi dana lebih besar dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan sesuai dengan serangkaian garis pedoman kebijakan yang lebih eksplisit dan meletakkan strategi manajemen prestasi yang terartikulasi di atas perencanaan tersebut, maka hal tersebut akan memudahkan dan mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pendidikan publik.



Hal ini berarti bahwa tugas manajemen sekolah ditentukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, anggota pengelola sekolah (dewan direktur, pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, siswa dan seterusnya) memiliki otonomi dan tanggung jawab lebih besar dalam mengelola kegiatan pendidikan di sekolah.

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai control, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Latar belakang munculnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tak lepas dari kinerja pendidikan di suatu Negara berdasarkan system pendidikan yang ada sebelumnya. Diantara tahun 1960-an hingga 1970-an berbagai inovasi dilakukan melalui pengenalan kurikulum baru dan pendekatan metode pengajaran baru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, namun hasilnya tidak memuaskan. Demikian juga di banyak Negara lain seperti Kanada, Amerika, Australia, Inggris, Perancis, Selandia Baru, dan Indonesia.

Di Indonesia, latar belakang munculnya Manajemen Berbasis Sekolah tidak jauh berbeda dengan Negara-negara maju yang terlebih dahulu menerapkannya. Perbedaan yang mencolok ialah lambatnya kesadaran para pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia. Bayangkan saja di banyak Negara gerakan reformasi pendidikan model Manajemen



Berbasis Sekolah ini sudah terjadi pada tahun 1970-an dan disusul banyak Negara pada tahun 1980-an, namun di Indonesia baru dimulai 30 tahun kemudian. Hal ini tidak terlepas dari system otoriter selama orde baru. Semua diatur dari pusat, yaitu di Jakarta baik dalam penentuan kurikulum sekolah, anggaran pendidikan, pengangkatan guru, metode pembelajaran, buku pelajaran, alat peraga hingga jam sekolah maupun jenis upacara yang harus dilaksanakan di sekolah.

Selama bertahun-tahun upaya perbaikan pendidikan selalu dilaksanakan dengan cara tambal sulam, karena belum ada upaya yang maksimal dari birokrat pendidikan di atas sana. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) muncul karena beberapa alasan. (1) terjadinya ketimpangan kekuasaan dan kewenangan yang terlalu terpusat pada atasan yang mengesampingkan bawahan. (2) kinerja pendidikan yang tidak kunjung membaik bahkan cenderung menurun di banyak Negara. Ketiga, (3) adanya kesadaran para birokrat dan desakan dari para pecinta pendidikan untuk merestrukturisasi pengelolaan pendidikan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang mana selama ini masih dirasa masih kurang, diantaranya dengan membuat program program antara lain “aku anak sekolah” dan dana bantuan operasional. Program tersebut diharapkan mampu menjunjung kualitas maupun kuantitas pendidikan di Indonesia, akantetapi karena pengelolaannya masih terpusat dan kaku, program tersebut tidak dapat memberikan dampak positif. Dugaannya adalah masalah manajemen yang belum sesuai. Hingga munculah suatu



pemikiran atau gagasan baru dalam pengelolaan pendidikan yang memberi kebijakan kepada masing-masing sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan dari pemerintah. Pemikiran inilah yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah kebijakan pemerintah yang diberikan masing-masing sekolah untuk mengelola dan mengoptimalkan pendidikan di daerahnya sesuai dengan karakteristik di daerahnya masing-masing dan keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

B. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “school-based management”. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Menurut Edmond yang dikutip Suryosubroto merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Nurcholis mengatakan Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan (Nurcholis, 2003). Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan



mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Lebih lanjut istilah manajemen sekolah kerap disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan berbeda; pertama, mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi); kedua, melihat manajemen lebih luas dibanding administrasi (administrasi merupakan inti dari manajemen); dan ketiga yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi.

Berdasarkan fungsi pokoknya, istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu: merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), mengarahkan (*directing*), mengkoordinasikan (*coordinating*), mengawasi (*controlling*), dan mengevaluasi (*evaluation*). Gaffar (1989) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Subakir dan Sapari (2001), tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah, dengan adanya wewenang



yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri.

Sedangkan menurut Mulyasa (2006), tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu:

- a. efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.
- b. Peningkatan mutu, antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah.
- c. Peningkatan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

3. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Depdiknas (2000), manfaat manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga dia dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaga.
- 2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.



- 3) Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.
- 4) Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

C. Prinsip Dasar Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Nurkolis (2005) bahwa teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat prinsip yaitu:

1. Prinsip Ekuifinalitas (*Principal of Equifinality*)

Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Karena kompleksnya pekerjaan sekolah saat ini dan adanya perbedaan yang besar antara sekolah yang satu dengan yang lain, misalnya perbedaan tingkat akademik siswa dan situasi komunitasnya, sekolah tak dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh kota, provinsi, apalagi negara. Sekolah harus mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan



kondisinya. Walaupun sekolah yang berbeda memiliki masalah yang sama, cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang satu dengan yang lain.

2. Prinsip Desentralisasi (*Principal of Decentralization*)

Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan secepat mungkin ketika masalah itu muncul. Dengan kata lain tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Oleh karena itu, MBS harus mampu menemukan masalah, memecahkannya tepat waktu dan memberi sumbangan yang lebih besar terhadap efektivitas aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Tanpa adanya desentralisasi kewenangan kepada sekolah itu sendiri, sekolah tidak dapat memecahkan masalahnya secara cepat, tepat, dan efisiensi.

3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (*Principal of Self Managing System*)

Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari



birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah. Dengan adanya kewenangan di tingkat sekolah itulah maka sekolah dapat melakukan sistem pengelolaan mandiri.

4. Prinsip Inisiatif Manusia (*Principal of Human Initiative*)

Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Sekolah dan lembaga pendidikan yang lebih luas tidak dapat lagi menggunakan istilah staffing yang konotasinya hanya mengelola manusia sebagai barang yang statis. Lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan human resources development yang memiliki konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

D. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah dalam Perspektif Teoritik

1. Pola Baru Manajemen Pendidikan

Perubahan dalam manajemen pendidikan disebabkan oleh lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional yang selama ini bersifat sentralistik. Otonomi daerah telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Kebijakan ini diterapkan pemerintah dalam kerangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.



Salah satu bentuk kebijakan itu adalah perubahan dalam manajemen pendidikan.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara pola lama dengan pola baru manajemen pendidikan. Pada pola lama manajemen pendidikan, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sementara itu, pada pola baru manajemen pendidikan sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat makin besar, sekolah lebih luwes dalam mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi diri sekolah daripada diatur dari luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari resiko menjadi mengolah resiko, penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan (*efficiency based budgeting*), lebih mengutamakan *teamwork*, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien.

2. Manajemen Berbasis Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Apakah mutu itu? Apakah ada jaminan bahwa penerapan pembaharuan dalam pola



manajemen (pengelolaan) sekolah (MBS) dengan peningkatan mutu sekolah atau pendidikan?. Pertanyaan tersebut juga dikemukakan oleh Abu-Duhou (1999), Wohlstetter & Mohrman (1996). Beberapa penelitian dan kajian MBS di beberapa negara menunjukkan bahwa MBS tidak serta merta menjamin peningkatan mutu pendidikan, terutama apabila MBS dilaksanakan secara sempit atau dilaksanakan secara parsial. Namun demikian, bukan berarti MBS tidak ada kaitannya sama sekali dengan peningkatan mutu pendidikan.

Untuk menjawab sejauh mana keterkaitan antara Manajemen Berbasis Sekolah dan mutu pendidikan, perlu ada pemahaman bersama tentang konsep mutu pendidikan, karena persepsi tentang mutu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Sejauh mana konsep tentang mutu dan strategi peningkatan mutu dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah. Mutu, dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang atau jasa. Mutu dapat bersifat abstrak, namun dapat dirasakan, baik itu berupa barang atau jasa. Oleh karena itu makna mutu akan berbeda antara orang yang satu dengan orang lainnya, tergantung dari sudut pandang dan kebutuhannya (Sallis, 1993). Dalam konteks pendidikan banyak pendapat tentang mutu. Namun demikian, kajian tentang mutu dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek input, proses, output dan dampak serta manfaat. Pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi, dan input-input lainnya yang diperlukan dalam proses pendidikan. Ada pula yang



mengaitkan mutu pada proses (pembelajaran), dengan argumen bahwa proses pendidikan (pembelajaran) itu yang paling menentukan kualitas. Jika mutu ingin diraih, maka proses harus diamati dan dijadikan fokus perhatian. Melalui proses, penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan pendidikan, metoda, dan teknik-teknik pembelajaran yang dianggap efektif. Orientasi mutu dari aspek output mendasarkan pada hasil pendidikan (pembelajaran) yang ditunjukkan oleh keunggulan akademik dan nonakademik di suatu sekolah.

Dari segi lingkup kompetensi yang harus dicapai begitu luas. Pandangan tentang mutu pun kemudian meliputi berbagai aspek kompetensi. Bukan hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga afektif, psikomotor, dan bahkan spiritual. Mutu tidak hanya terfokus pada pencapaian atau prestasi akademis (*academic achievement*), tetapi juga bidang-bidang non akademik, seperti prestasi seni, keterampilan sosial, keterampilan vokasional, serta penghayatan dan pengamalan spiritual dalam bentuk budi pekerti luhur. Yang sering menjadi masalah adalah bagaimana menilai secara akurat berbagai aspek kompetensi tersebut. Apalagi kalau seluruhnya harus berdasarkan standar nasional. Sementara itu, sebagian ranah kemampuan yang dicapai untuk sebagian relatif sukar mengukurnya.

Beberapa jenis kompetensi juga banyak yang lebih bersifat lokal, seperti keterampilan vokasional, keterampilan sosial, serta budi pekerti. Menurut Sallis (1993), terdapat tiga pengertian konsep mutu. Pertama, mutu sebagai konsep yang absolut (*mutlak*), kedua, mutu dalam konsep yang relatif, dan ketiga mutu menurut



pelanggan. Dalam pengertian absolut, sesuatu disebut bermutu jika memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga mutu dianggap sesuatu yang ideal yang tidak dapat dikompromikan, seperti kebaikan, keindahan, kebenaran. Mutu dalam konsep ini menunjukkan keunggulan status dan posisi dengan mutu tinggi (high quality). Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu absolut bersifat elit karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat memberikan pendidikan dengan high quality kepada siswa, dan sebagian besar siswa tidak dapat menjangkaunya. Walaupun jumlah lembaga pendidikan dalam pengertian absolut ini sangat terbatas dan sulit untuk dijadikan rujukan karena tidak ada standar yang umum, dalam pembicaraan sehari-hari banyak orang berbicara tentang mutu pendidikan, dengan mengacu pada pengertian absolut ini. Kualitas dalam pengertian absolut dapat menjadi sesuatu yang relatif dan bersifat dinamis, kalau suatu ketika muncul lembaga lain yang dipersepsi masyarakat sebagai yang terbaik, dengan standar tertinggi.

Dalam pengertian relatif, mutu bukanlah suatu atribut dari suatu produk atau jasa, tetapi sesuatu yang berasal dari produk atau jasa itu sendiri. Artinya, sesuatu dikatakan bermutu apabila suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau standar yang ada. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi memenuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi tujuan pelanggan. Jadi pada konteks ini sangat tergantung standarnya, apakah standar tinggi, sedang, atau rendah. Dalam konsep relatif, produk yang bermutu adalah yang sesuai dengan tujuannya.



Menurutnya, terdapat dua aspek dari mutu relatif, yaitu mutu yang didasarkan pada standar, dan mutu yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Aspek pertama menunjukkan bahwa mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. Pemenuhan standar ini ditunjukkan oleh produsen secara konsisten sehingga hasilnya (produk maupun jasa) tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Upaya menjaga kualitas secara konsisten berdasarkan sistem yang dianut dan dimiliki oleh lembaga produsen tersebut biasa disebut “penjaminan mutu” atau “quality assurance”. Aspek kedua, konsep ini juga mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar (persyaratan, kriteria, dan spesifikasi) produk dan/atau jasa yang dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan. Perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan, bukan semata mata kehendak produsen.

Menurut pengertian pelanggan (kalau di bidang pendidikan bisa juga disebut dengan pemakai jasa pendidikan), mutu adalah sesuatu yang didefinisikan oleh pelanggan. Pelanggan adalah penilai utama terhadap mutu. Pelanggan dianggap penentu akhir tentang mutu suatu produk atau jasa, karena tanpa mereka, suatu lembaga tidak dapat hidup atau tidak akan ada. Dengan konsep ini, ujung-ujungnya adalah kepuasan pelanggan, sehingga mutu ditentukan sejauh mana ia mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka atau bahkan melebihi. Dalam konteks pendidikan, produk dari lembaga pendidikan berupa jasa. Kepuasan pelanggan (siswa, orang tua dan masyarakat)



dapat dibagi dalam dua aspek yaitu tata layanan pendidikan dan prestasi yang dicapai siswa. Dari aspek tata layanan pendidikan, kepuasan pelanggan dilihat dari layanan penyelenggaraan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan, seperti layanan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari aspek prestasi yang dicapai siswa, mutu dihubungkan dengan capaian yang telah diperoleh dalam kaitannya dengan kompetensi yang diinginkan oleh pelanggan.

Dari ketiga konsep mutu tersebut, konsep mana yang dianut dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia? Kalau dicermati dari praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, ketiga konsep di atas digunakan secara integrasi, baik mutu dalam pengertian absolut, relatif (standar), maupun kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uraian tentang konsep mutu di atas, maka ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan. (1) setiap penyelenggara dan pengelola pendidikan perlu memahami makna mutu pendidikan. Hal ini sangat penting karena pandangan terhadap mutu akan berbeda sesuai dengan tujuan dan keinginan. Dengan pemahaman tentang mutu, penyelenggara dapat secara jelas mengarahkan satuan pendidikan yang dikelolanya menuju tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu pada kondisi ini penerapan MBS perlu dilakukan. (2) konsep mutu dalam pengertian standar dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat 3 aspek penting yaitu input, proses, dan output. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Standar dari ke 3 aspek itu dapat mengacu kepada sistem standar yang telah ada seperti Standar Pelayanan



Minimal, Sistem Akreditasi, atau delapan Standar Nasional Pendidikan yang sampai saat masih terus dikembangkan. Walaupun penerapan konsep standar ini sulit dalam dunia pendidikan karena mengacu kepada produk 'pendidikan' yang derajat kekonsistennya tidak sama dengan barang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penyelenggara pendidikan berusaha secara terus-menerus dengan pemahaman konsep mutu itu untuk mengembangkan mutu input, proses dan output sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Usaha penyelenggara pendidikan tersebut disebut sebagai 'tata layanan' pendidikan yang akan diterima siswa sebagai pelanggan utama pendidikan. Ketiga aspek (input, proses dan output) haruslah dipandang sebagai satu kesatuan dalam kerangka memberikan layanan yang optimal kepada pelanggan (misalnya siswa), sehingga penyelenggara pendidikan dapat mengantarkan siswa sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan standar yang dibuat baik secara lokal, regional, maupun nasional. (3) menurut Sallis (1993), istilah pelanggan mengacu pada konsumen eksternal dan konsumen internal. Siswa merupakan konsumen primer, karena merekalah yang memperoleh layanan langsung dari institusi pendidikan. Orang tua dan pemerintah (di Indonesia termasuk pemerintah propinsi, kabupaten/ kota) sebagai konsumen sekunder, karena mereka yang membiayai individu atau institusi pendidikan yang bersangkutan, sehingga sangat penting dan menentukan. Pengguna lulusan (dunia kerja), pemerintah, dan masyarakat luas sebagai konsumen tersier, karena sungguh pun tidak langsung berhubungan dengan lembaga pendidikan, tetapi pengaruhnya sangat penting. Konsumen primer, sekunder, dan tersier tersebut



merupakan konsumen eksternal (sering juga disebut external stakeholders)

3. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah

Bertolak dari pembahasan pada Unit 1 tentang berbagai pengertian MBS, pada dasarnya terdapat empat prinsip MBS yaitu otonomi sekolah, fleksibilitas, dan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri (pengelolaan mandiri). Dalam hal prinsip pengelolaan mandiri dibedakan dari pandangan yang menganggap sekolah hanya sebagai satuan organisasi pelaksana yang hanya melaksanakan segala sesuatu berdasarkan pengarahannya, petunjuk, dan instruksi dari atas atau dari luar. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah (sustainability). Istilah otonomi juga sama dengan istilah “swa”, misalnya swasembada, swakelola, swadana, swakarya, dan swalayan. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik, kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan



memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptif dan antisipatif, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi, serta kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Namun perlu digarisbawahi bahwa kemandirian tersebut tidak bersifat mutlak, absolut, atau semaunya. Kemandirian yang ada tetap harus bertolak pada ketentuan, peraturan, dan perundangan yang berlaku. Sebagai salah satu contoh peningkatan mutu pendidikan di sekolah, guru sebagai profesional memiliki keleluasaan untuk menerapkan kiat-kiat pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan keluwesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan keluwesan sekolah yang lebih besar, sekolah akan lebih lincah dan tidak harus menunggu arahan dari atasannya untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya.

Dengan prinsip fleksibilitas ini, sekolah akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Seperti pada prinsip otonomi di atas, prinsip fleksibilitas yang dimaksud tetap mengacu pada kebijakan, peraturan dan perundangan yang berlaku. Contoh fleksibilitas yang dapat dilakukan oleh seorang guru di sekolah adalah guru yang profesional memiliki kewenangan untuk memilih, menentukan metode, alat dan sumber belajar yang ia yakini efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan ia akan mempertanggungjawabkannya. Dalam konteks penyusunan program, masing-masing



sekolah dapat menentukan prioritas-prioritas program yang dapat dilakukan sesuai kondisi masing-masing sekolah yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Dengan demikian, program dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) akan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, bahkan ketika alokasi anggaran yang dimiliki sekolah jumlahnya sama, tetapi penekanan dan pemilihan prioritas dapat berbeda. Prinsip ini membuka kesempatan bagi kreativitas sekolah untuk melakukan upaya-upaya inovatif yang diyakini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah, terutama proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis. Warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan, dan sebagainya) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap sekolah, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi dalam mencapai tujuan sekolah. Singkatnya, makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa memiliki; makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar rasa tanggungjawab, makin besar pula dedikasinya. Tentu saja pelibatan warga sekolah dalam penyelenggaraan sekolah



harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan partisipasi. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan: (a) keterbukaan (transparansi); (b) kerja sama yang kuat; (c) akuntabilitas; dan (d) demokrasi pendidikan.

Jadi, peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah akan mampu menciptakan keterbukaan (transparansi), kerjasama yang kuat, akuntabilitas, dan demokrasi pendidikan. Mutu pendidikan, merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh MBS. Ketiga prinsip di atas yaitu otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi merupakan prinsip yang mendasari pencapaian mutu pendidikan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan betapapun kondisi dan konteksnya mempunyai peluang untuk maju dan karenanya dapat ditingkatkan mutunya. Artinya, pengembangan sekolah atau peningkatan mutu pendidikan pada level sekolah harus berangkat dari potensi diri satuan pendidikan dari berbagai aspeknya. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pada tingkat satuan pendidikan bukanlah suatu pekerjaan mudah dan dapat dicapai dalam satu kali program. Mutu pendidikan dicapai secara bertahap; direncanakan, dan dilaksanakan secara sungguh sungguh pada setiap tahapan waktu ada target dan tujuan spesifik yang jelas, sehingga setiap tahun jelas ada kemajuannya. Prinsip ini juga mengandung implikasi bahwa satuan pendidikan yang sudah bermutu pun masih terus-menerus meningkatkan mutunya, karena tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakat senantiasa berubah, demikian pula tuntutan stakeholders lainnya.



Sekolah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri: tingkat kemandirian tinggi atau tingkat ketergantungan rendah, bersifat adaptif dan antisipatif/proaktif sekaligus, memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya), bertanggungjawab terhadap kinerja sekolah, memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya, serta prestasi menjadi acuan bagi penilaiannya. Selanjutnya, sumber daya manusia sekolah yang berdaya ditandai dengan: pekerjaan adalah miliknya, bertanggungjawab, pekerjaannya memiliki kontribusi, mengetahui posisinya di mana, memiliki kontrol terhadap pekerjaannya, serta pekerjaannya merupakan bagian hidupnya.

Contoh tentang hal-hal yang dapat memandirikan/memberdayakan warga sekolah adalah: pemberian kewenangan, pemberian tanggungjawab, pekerjaan yang bermakna, pemecahan masalah secara teamwork, variasi tugas, hasil kerja yang terukur, kemampuan untuk mengukur kinerja sendiri, tantangan, kepercayaan, didengar, ada pujian, menghargai ide-ide, mengetahui bahwa dia adalah bagian penting dari sekolah, control yang luwes, dukungan, komunikasi yang efektif, umpan balik bagus, sumber daya yang dibutuhkan ada, dan warga sekolah diberlakukan sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki martabat tinggi.

Menurut Nurkholis (2003:52) terdapat empat prinsip untuk mengelola sekolah dengan menggunakan MBS, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya



manusia. Menurutnya, prinsip ekuifinalitas didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Perbedaan kondisi sekolah dapat dilihat dari aspek perbedaan tingkat akademik siswa dan situasi komunitasnya, sekolah tidak dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh kota, provinsi, apalagi negara. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi sekolah, harus dapat dipecahkan sekolah dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Walaupun sekolah yang berbeda memiliki masalah yang sama, cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang satu dengan yang lain.

Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Prinsip ekuifinalitas mendorong adanya desentralisasi kekuasaan dengan mempersilakan sekolah memiliki ruang yang lebih luas untuk bergerak, berkembang, dan bekerja menurut strategi-strategi unik mereka untuk menjalankan dan mengelola sekolahnya secara efektif. Oleh karena itu, sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan secepat mungkin ketika masalah itu muncul. Dengan kata lain tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah.



4. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Nurkholis (2003:56), MBS memiliki 8 karakteristik.

1. Sekolah dengan MBS memiliki misi atau cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan memberi arah kerja. Misi ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap fungsi dan efektivitas sekolah, karena dengan misi ini warga sekolah dapat mengembangkan budaya organisasi sekolah yang tepat, membangun komitmen yang tinggi terhadap sekolah, dan mempunyai inisiatif untuk memberikan tingkat layanan pendidikan yang lebih baik.
2. aktivitas pendidikan dijalankan berdasarkan karakteristik kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas sangat penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena secara tidak langsung memperkenalkan perubahan manajemen sekolah dari manajemen kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah.
3. terjadinya proses perubahan strategi manajemen yang menyangkut hakikat manusia, organisasi sekolah, gaya pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, penggunaan kekuasaan, dan keterampilan-keterampilan manajemen. Oleh karena itu dalam konteks pelaksanaan MBS, perubahan strategi manajemen lebih memandang pada aspek pengembangan yang tepat dan relevan dengan kebutuhan sekolah.
4. keleluasaan dan keweangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan,



guna memecahkan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan dan sebagainya.

5. MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator sekolah, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di sekolah. Dengan MBS sekolah dapat mengembangkan siswa dan guru sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Dalam konteks ini, sekolah berperan mengembangkan inisiatif, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi semua kemungkinan untuk memfasilitasi efektivitas pembelajaran. Demikian halnya dengan unsur-unsur lain seperti guru, orang tua, komite sekolah, administrator sekolah, dinas pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan perannya masing-masing.
6. MBS menekankan hubungan antarmanusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen Manajemen Berbasis sekolah yang menguntungkan.
7. peran administrator sangat penting dalam kerangka MBS, termasuk di dalamnya kualitas yang dimiliki administrator.
8. dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multitingkat dan multisegi. Penilaian tentang efektivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah. Oleh karena itu, penilaian efektivitas sekolah harus memperhatikan multitingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok, dan individu, serta indikator multisegi yaitu input, proses dan output sekolah serta perkembangan akademik siswa.



E. Kondisi yang Mendukung Implementasi di Sekolah

Implementasi MBS akan berjalan secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu membiayai staf sesuai dengan fungsinya, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi. Kondisi sekolah-sekolah di Indonesia saat ini sangat bervariasi dilihat dari segi kualitas (sangat maju sampai dengan sangat ketinggalan), lokasi sekolah (perkotaan sampai dengan daerah terpencil), dan partisipasi masyarakat (mulai dari partisipasi yang tinggi, sedang, sampai dengan yang tidak berpartisipasi sama sekali). Kondisi-kondisi tersebut merupakan permasalahan rumit yang perlu ditangani antara lain dengan cara mengimplementasikan MBS.

BPPN dan Bank dunia (1999) telah melakukan berbagai kajian, antara lain telah mengembangkan strategi pelaksanaan MBS, yang meliputi pengelompokan kepala sekolah berdasarkan kemampuan manajemen, pentahapan pelaksanaan MBS, dan perangkat pelaksanaan MBS.

a. Pengelompokan Sekolah

Mulyasa (2006: 59) mengemukakan bahwa, agar MBS dapat diimplementasikan secara optimal, perlu adanya pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat kemampuan manajemen masing-masing sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan. Usaha yang harus dilakukan oleh sekolah serta perlakuan pemerintah



terhadap sekolah haruslah berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh sekolah. Di sini hendaknya pemerintah melakukan upaya-upaya yang mendukung dan membantu sekolah-sekolah dengan kemampuan manajemen yang kurang untuk dapat mempersiapkan dan melaksanakan MBS dengan baik.

b. Pentahapan Implementasi MBS

Penerapan MBS secara menyeluruh sebagai realisasi desentralisasi pendidikan memerlukan perubahan-perubahan tentang aspek-aspek yang menyangkut keuangan, ketenagaan, kurikulum, sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Hal ini merupakan permasalahan pendidikan yang rumit yang akan mempengaruhi kecepatan waktu pelaksanaan MBS. Oleh karena itu, MBS diyakini akan dapat dilaksanakan paling tidak melalui tiga tahap yaitu :

- (1) Jangka pendek (tahun pertama sampai dengan tahun ketiga)
- (2) Jangka menengah (tahun keempat sampai dengan tahun keenam),
- (3) Jangka panjang (setelah tahun keenam).

Pelaksanaan jangka pendek diprioritaskan pada kegiatan yang tidak memerlukan perubahan mendasar terhadap aspek- aspek pendidikan misalnya sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan MBS, sedangkan perubahan-perubahan mendasar tentang aspek- aspek pendidikan dapat dilakukan sebagai strategi jangka menengah dan panjang.



Berdasarkan pemaparan diatas data disimpulkan bahwa Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “*school based management*”. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Nurcholis mengatakan Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan (Nurkolis, 2003). Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan. pelaksanaan. Perangkat implementasi ini perlu diperkenalkan sejak awal, melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek.





Daftar Pustaka

- Anonim. 2020. *Administrasi Sekolah Sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan*.
(<https://pintek.id/blog/administrasi-sekolah/>).
Diakses pada 09 Oktober 2020
- Anonym. 2011. Hakikat Profesi Kependidikan (online).
<http://aniendriani.blogspot.com/2011/03/hakekat-profesi-kependidikan.html>. diakses tanggal 8 November 2012.
- B. Kotten, Natsir. 2012. *Profesi Kependidikan, Potret Guru Humanis*. Cetakan Pertama. Flores: Nusa Indah
- Daryanto, Drs. 2008. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional , 2002, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep Dasar, Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Departemen, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
- Imron, A. (2011). *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isnanto, Rizal. 2009. *Buku Ajar Etika Profesi*. Semarang: Data PDF.



Muchlisin Riadi, 2019. Manajemen Berbasis Sekolah

<https://www.kajianpustaka.com/2019/03/manajemen-berbasis-sekolah.html>

Mudlofir, Ali. 2012. *Pendidik Profesional*. Cetaklan Pertama. Jakarta ; Rajawali Pers

Mulyasa.E, 2005 Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nurkholis, 2003, Manajemen Berbasis Sekolah , Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia

Soebagio Admodiwirio, 2000, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: Ardadizyajaya.

Soetjipto dan Kosasi Rafliis. 2004. *Profesi Keguruan*. Cetakan kedua. Jakarta : Rineka Cipta

Susilowati. 2010. Inisiasi Profesi Keguruan (online). Data PDF.

Tirtarahardja, Umar dan La Sulo, S.L. 2010. *Pengantar Pendidikan*. Edisi revisi ke 4. Jakarta:

Sujadi, Eko. 2018. Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol 14, No. 02, Desember 2018, pp. 69-77. Diakses tanggal : 16/10/2020



febraeldefilia.files.wordpress.com//Peranan Guru dalam Bimbingan Konseling Sekolah. Diakses tanggal: 16/10/2020

Tohrin. 2007. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Wikipedia.2013.langkah-langkah menyusun RPP dan silabus.Jakarta:Erlangga





Profil Penulis



I Komang Sukendra, S.Pd., M.Si., M.Pd. Lahir 02 Agustus 1970 di Bugbug Kecamatan Karangasen, Kabupaten Karangasen Provinsi Bali. Putra dari pasangan I Ketut Kantun dan Ni Wayan Kupit. Menempuh pendidikan S1 STKIP Negeri Singaraja Bali Jurusan Pendidikan Matematika (1990-1996), S2 Universitas Mahasaraswati Denpasar Jurusan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan (2008-2010), S2 Universitas Ganesha (Undiksha) Jurusan Pendidikan Matematika (2012-2014); Sedang S3 di Undiksha, Ilmu Pendidikan Kosentrasi Pendidikan Matematika (2018-sekarang)

Pengalaman: (1) Sebagai Dosen di IKIP PGRI Bali di Pendidikan Matematika, (2) Sekretaris LPPM IKIP PGRI Bali periode 2016-2019 dan Periode 2019-2020 , (3) Sekretaris LPPM Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Periode 2020-2024.



Putu Dessy Fridayanthi, S.T., M.I.Kom. Lahir 19 Desember 1980 di Denpasar Bali. Putri pertama pasangan Wayan Susastra dan Putu Suprapti Santy Sastra, S.H., CHT., CI ini menempuh pendidikan S1 di Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. (1999 – 2004). Dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.

Pengalaman sebagai Dosen di IKIP PGRI Bali, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Bahasa Indonesia sejak tahun 2010 hingga sekarang. Menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Universitas PGRI Mahadewa Indonesia sejak tahun 2018 hingga sekarang. Dan sudah menjalani profesi sebagai MC (*Master of Ceremony*) untuk berbagai acara sejak tahun 1998 hingga saat ini.